



# RENSTRA 2024-2026

PEMERINTAH KOTA SERANG

KECAMATAN WALANTAKA





**KEPUTUSAN CAMAT  
KECAMATAN WALANTAKA  
KOTA SERANG**

Nomor : 800 / /Kec-wltk/ /2024

**T E N T A N G  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026  
KECAMATAN WALANTAKA KOTA SERANG**

---

**CAMAT WALANTAKA  
KOTA SERANG**

- Menimbang : a. Bahwa ini untuk menabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Serang Tahun 2018 - 2023, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA);
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun);
10. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Kelembagaan;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang Menyebutkan bahwa untuk segera melakukan Penyesuaian Dokumen Perencanaan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah;

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : Keputusan Camat Walantaka tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Walantaka Kota Serang Tahun 2024 - 2026;

**KESATU** : Yang dimaksud dengan Rencana Strategis dalam Keputusan ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) Tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis intansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

**KEDUA** : Renstra Kecamatan Walantaka Kota Serang sebagai Dokumen Perencanaan sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

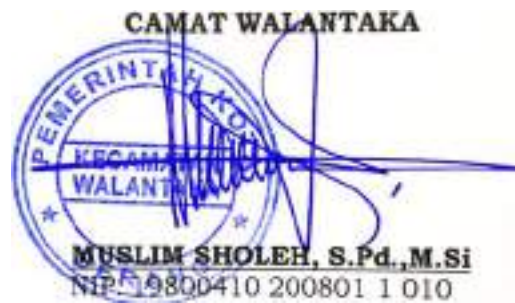
**KETIGA** : Rencana Strategis ini disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program sosiall pada khususnya di

Kota Serang;

KEEMPAT : Uraian lengkap Rencana Strategis Kecamatan Walantaka Kota Serang Tahun 2024 - 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal       Maret 2024



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Walantaka Kota Serang Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Walantaka Kota Serang Tahun 2024-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penetapan target yang ada pada renstra selanjutnya menjadi implementasi Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) PD, dan akan dievaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Untuk itu pencapaian target tersebut perlu dipahami dan disepakati bersama serta diupayakan untuk diwujudkan oleh segenap unsur pimpinan dan staf Kecamatan Walantaka Kota Serang.

Penyusunan Renstra ini diharapkan akan menjadi acuan dan pedoman aparatur pemerintah Kecamatan Walantaka dalam mewujudkan peningkatan pelayanan yang professional, transparan dan akuntabel kepada masyarakat sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Serang,       Maret 2023

**CAMAT WALANTAKA**  
  
**MUSLIM SHOLEH, S.Pd., M.Si**  
NIP. 19800410 200801 1 010

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	19
2.3 Kinerja Pelayanan OPD .....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan .....	35
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....</b>	<b>37</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	39
3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	40
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH .....	44
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>132</b>
<b>BAB VI RENACANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>136</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>275</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>278</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 DAFTAR KLASIFIKASI PEGAWAI KECAMATAN WALANTAKA .....	20
TABEL 2.2 TABEL ESELON DAN GOLONGAN PEGAWAI KECAMATAN WALANTAKA .....	23
TABEL 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WALANTAKA .....	31
TABEL 3.1 PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	38
<b>TABEL 3.3 ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN WALANTAKA.....</b>	<b>40</b>
<b>TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WALANTAKA .....</b>	<b>45</b>
TABEL 4.2 CASCEDING KINERJA PERANGKAT DAERAH .....	46
TABEL 5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	133
TABEL 6.1 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.....	137
TABEL 6.2 RUMUSAN DAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR RENSTRA PD...	269
TABEL 6.3 RUMUSAN RENCANA PELAKSANAAN PROYEK PERIORITAS STRATEGIS RPD TAHUN 2024-2026 .....	274
TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	276
TABEL 7.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017).....	276
<b>TABEL 7.3 INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>277</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Walantaka Tahun 2024 - 2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dilakukan inventarisasi pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah tetapi pada periode saat ini Kecamatan Walantaka Kota Serang hanya Menyusun dokumen untuk 3 (tiga) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2024-2026 telah selaras dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor .... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2024-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka

mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 3 (tiga) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsure kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Walantaka dalam kurun waktu Tahun 2019-2023. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Walantaka untuk 3 (tiga) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2024-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 3 (tiga) tahun, Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2024-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026;
2. Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2024-2026 mempertimbangkan arah Pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5); Dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8);
3. Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2024-2026 disusun secara partisipatif Dengan Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Walantaka

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2024-2026 sebagaimana gambar berikut :



## 1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Kecamatan Walantaka Kota Serang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan landasan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
  19. INMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5);
  22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);
  23. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Walantaka Kota Serang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam jangka tiga tahun ke depan.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 3 (tiga) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tiga tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Walantaka Kota Serang adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 3 (tiga) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainabilitydevelopment) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Serang.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Walantaka Kota Serang selama 3 tahun mendatang
5. Meningkatkan pelayanan secara prima.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Kecamatan Walantaka Kota Serang Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WALANTAKA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Mempedomani Peraturan Walikota Serang Nomor 27 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang bahwa dapat kami sampaikan Tugas Fungsi Kecamatan Walantaka antara lain :

#### **1. TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Kecamatan**

- (1) Kecamatan di pimpin oleh Camat yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
  - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota, meliputi :
  - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
  - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- (4) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan kriteria :
  - a. proses sederhana;
  - b. objek perizinan berskala kecil;



- c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
  - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (6) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
- (7) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan kriteria:
- a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
  - b. kegiatan berskala kecil; dan
  - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

### **Sekretariat**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasi penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. mengkoordinasi penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. evaluasi dan pelaporan administrasi umum, perencanaan program, anggaran dan ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
  - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
  - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
  - i. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
  - j. melaksanakan pengelolaan barang/perlengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapian ruangan kantor;
  - l. melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan egovernment;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian keuangan, program, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
  - c. melaksanakan penatausahaan anggaran Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan kas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan pelayanan lainnya di bidang keuangan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan penyimpanan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
  - g. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan;
  - i. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
  - j. melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rka/rkpa dari unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;
  - k. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran/ dokumen pelaksanaan perubahan anggaran berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Kecamatan;
  - l. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Kecamatan;
  - m. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun laporan kinerja instansi pemerintah di lingkup Kecamatan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :
  - a. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;
  - b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  - c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
  - a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - b. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - c. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - d. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

### **Seksi Pemerintahan Umum**

- (1) Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pemerintahan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan

- undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
- b. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional);
  - c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - d. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - e. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
  - g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
  - h. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
  - i. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

### **Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
  - b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - c. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
  - d. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
  - e. koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
  - g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
  - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
    - (1) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;

- (2) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
  - (3) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
  - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

### **Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pada Kecamatan**

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala Seksi pada masing-masing tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Kelurahan**

- (1) Kelurahan di pimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
  - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
  - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Sekretaris**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sekretariat;
  - b. melakukan penyusunan kebijakan umum dan teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas meliputi rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, rencana kerja dan anggaran dan penetapan kinerja;
  - d. melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit kerja di lingkungan Kelurahan;
  - e. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran/ dokumen pelaksanaan perubahan anggaran berdasarkan usulan unitunit kerja dan hasil pembahasan internal Kelurahan;
  - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Kelurahan;
  - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan;
  - h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan kelurahan dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun laporan kinerja instansi pemerintah lingkup Kelurahan dan laporan kedinasan lainnya;
  - i. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;
  - j. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan Kelurahan;
  - k. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang kelurahan;
  - l. melakukan pengelolaan barang/perengkapan/aset Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - n. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Kelurahan;
  - q. melakukan penatausahaan anggaran Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - r. melakukan pengelolaan kas Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - s. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - t. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Kelurahan;
  - u. melakukan penyusunan laporan keuangan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - v. melakukan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
  - w. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
  - x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kelurahan.

#### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :
  - a. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan;
  - b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;
  - c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
  - d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.



### **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
  - a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kelurahan;
  - b. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - d. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kelurahan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

### **Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik**

- (1) Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pemerintahan umum dan Pelayanan Publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi :
  - a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
  - c. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - d. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
  - e. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
  - f. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan;
  - g. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan;

- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

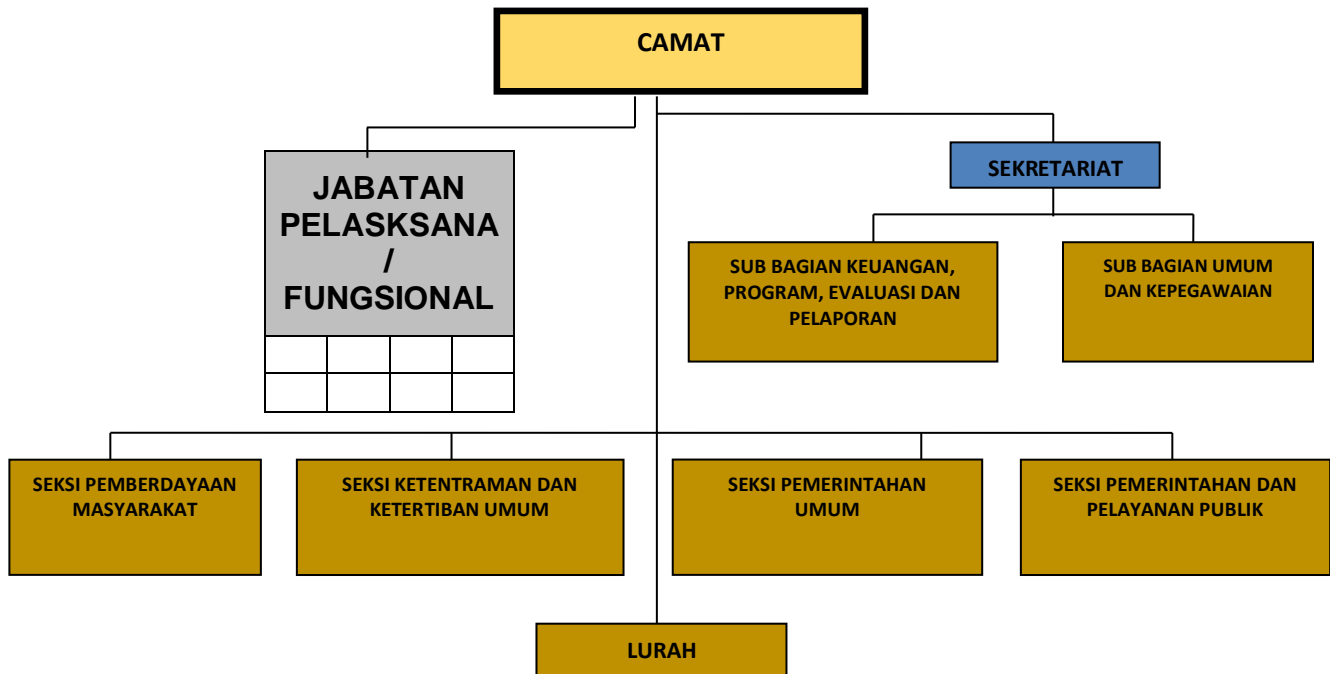
#### **Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pada Kelurahan**

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris dan/atau Kepala Seksi pada masing-masing tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

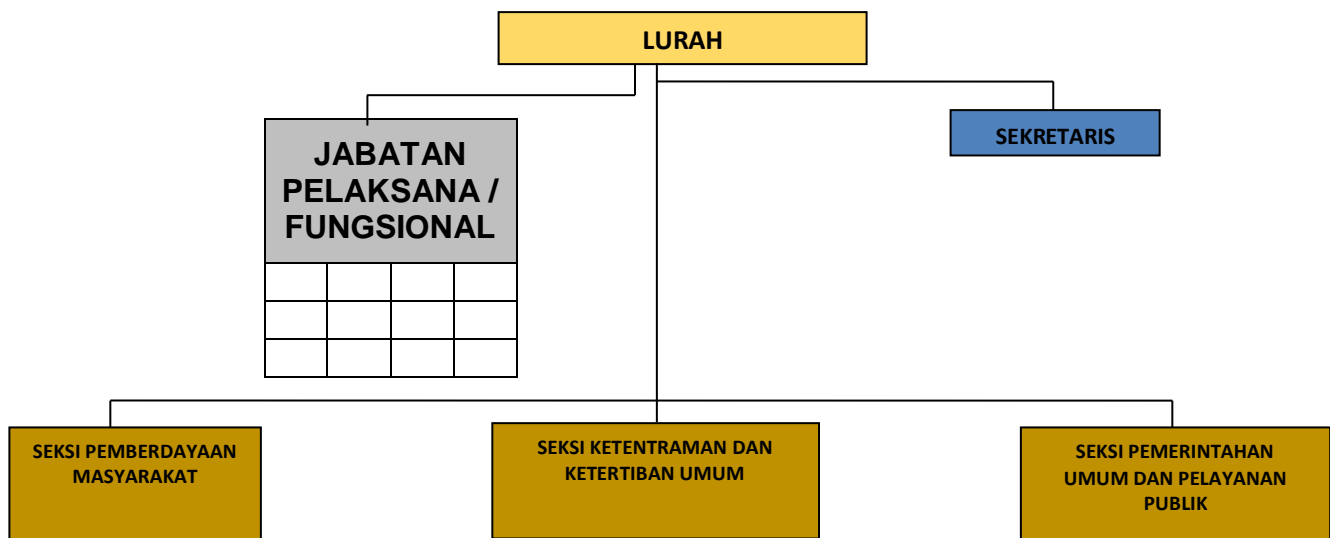
#### **2. Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut, terdiri dari :**

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemerintahan Umum;
- f. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik; dan
- g. jabatan Pelaksana dan Jabatan fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Walantaka



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan di Wilayah Kecamatan Walantaka



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberdayaan daerah antara lain dapat dilihat dari kapabilitas aparatur, yaitu yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan aparatur. Indikator ini ditunjukkan dengan: (1) Tingkat pendidikan aparatur yang digambarkan dengan persentase jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, (2) Perkembangan jumlah aparatur, dan (3) Tingkat kreativitas aparatur. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tugas yang diemban Kecamatan Walantaka, saat ini didukung oleh pegawai yang tercatat sebanyak 61 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Daftar Klasifikasi Pegawai Kecamatan Walantaka

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Camat	1 Orang
2.	Sekretaris Camat	1 Orang
3.	Kepala Seksi	2 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	1 Orang
5.	Lurah	14 Orang
6.	Sekel	12 Orang
8.	Kasi Kelurahan	27 Orang
9.	Pelaksana	3 Orang
<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>61 Orang</b>

Tabel 2.2 Data Pegawai :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	MUSLIM SHOLEH, S.Pd, M.Si	Pembina / IV a	Camat
	NIP. 19800410 200801 1 010		
2	Drs. H. MAHPUD	Penata TK.I / III d	Sekretaris Camat
	NIP. 19651110 198610 1 008		
3	DONY S, S.Sos, MM	Penata Muda Tk.I / III b	Kasi Pemerintahan & Pelayanan Publik
	NIP.1790509 200012 1 001		
4	BAIHAKI, S.Pd	Penata TK. I / III d	Kasi Trantibum
	NIP.19810315 200801 1 008		
5	ERNA YUNITA, Amd.Kom	Penata Muda Tk.1 /III b	Kasubag Umum & Kepegawaian
	NIP. 19820412 201001 2 015		
6	MOHAMAD ALI, AMG	Penata Muda Tk.I/ III b	Kasubag PEP dan Keuangan
	NIP. 19800229 201101 1 001		
7	HUDARI	Pengatur Muda Tk.I/ II b	Pelaksana
	NIP. 19780126 201408 1 002		
<b>KELURAHAN : NYAPAH</b>			
8	AMINUDIN, SE	Penata / III c	Kepala Kelurahan
	NIP. 19750209 201001 1 009		
9	DARMAT, SE	Penata / III c	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19740616 199903 1 008		
10	RITA ROSITA, SE	Penata / III c	Kasi PMK
	NIP. 19720415 200701 2 012		
<b>KELURAHAN : CIGOONG</b>			
11	JAKAR, SP.d	Penata Tk.I / III d	Kepala Kelurahan
	NIP. 19851213 201001 1 001		
12	MOCHAMAD NAFIRIN, SE	Penata Muda TK. I / III b	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19770802 200902 1 004		

13	RATU MUHDIROH, S.Sos	Penata / III c	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19750813 200801 2 006		
<b>KELURAHAN : WALANTAKA</b>			
14	KOMALASARI, S.Pd	Penata / III c	Kepala Kelurahan
	NIP. 19800912 200801 2 008		
15	SUHARYADI, SE	Penata TK. I / III d	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19690816 199003 1 008		
16	Hj. NANI KUSTINI, STr.,Keb	Penata Muda Tk. I / III b	Kasi PMK
	NIP. 19751222 200807 2 006		
17	AHMAD FAHRUDIN,S.Sos	Penata / III c	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 197001281 199803 1 002		
<b>KELURAHAN : PENGAMPELAN</b>			
18	ASRORI, SE	Penata Muda TK. I / III b	Kepala Kelurahan
	NIP. 19820104 201409 1 002		
19	HANAFAI, S.Pd.I	Penata Tk. I / III d	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19770306 200801 1 001		
20	FILLY RATNAFURI,S.Kep	Penata / III c	Kasi PMK
	NIP.19830520 201001 2 016		
21	ERAH SUKHAERAH, S.Pd.SD	Penata / III c	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19830203 201001 2 007		
<b>KELURAHAN : KIARA</b>			
22	JADO, S.Ag,M.Si	Penata / III c	Kepala Kelurahan
	NIP. 19751001 201001 1 003		
23	DICKY SEPTIAN, SH	Penata / III c	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19750919 200901 1 002		
24	KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd	Penata / III c	Kasi PMK
	NIP. 19821205 200801 2 004		
25	YAYU SURYATI, S.ST	Penata TK. I / III d	Kasi PUM
	NIP. 19740625 200701 2 004		
<b>KELURAHAN : PAGERAGUNG</b>			
26	IIS ISTIHAROH,S.ST	Penata Tk I/ III d	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19750817 200701 2 024		
27	NASIROH, S.Pd, MM	Penata Tk I/ III d	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19830918 200902 2 008		
28	HAFID, A.Md.Kep	Penata / III c	Kasi Trantib
	NIP. 19800912 200902 1 003		
<b>KELURAHAN : KALODRAN</b>			
29	NINIS NASIFAH, SKM, S.Tr.Keb	Pembina/ IV a	Kepala Kelurahan
	NIP. 19730801 199403 2 006		
30	DANY WIRAWAN, S.Psi	Penata / III c	Kasi PMK
	NIP. 19750426 201001 1 006		
31	RASPEDI,S.Pd	Penata Tk.I/ III d	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19650306 199307 1 001		
32	NENI KHAERATUNNISA, A.Md.Kep	Penata Muda / III a	Kasi Trantib Kel.Kalodran
	NIP. 19841112 201101 2 002		
<b>KELURAHAN : KEPUREN</b>			
33	SUBHAN, SH	Penata / III c	Kepala Kelurahan
	NIP. 19820420 201001 1 017		

34	LUKMAN HAKIM, SE	Penata Muda TK.I / III b	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19840415 200701 1 005		
35	WAHYUNINGSIH, SKM,MM	Penata Tk.I / III d	Kasi PMK
	NIP. 19810728 200604 2 009		
36	UMAR ALI, SH	Penata / III c	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19790515 200902 1 005		
<b>KELURAHAN : TERITIH</b>			
37	SADELI, S.Sos, M.Si	Penata / III c	Kepala Kelurahan
	NIP. 19750825 200906 1 001		
38	NURUL HADI, SKM	Penata TK. I / III d	Kasi PMK
	NIP. 19851107 201001 1 006		
39	ANDRIYANA	Penata Muda Tk.I / III b	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19851225 201410 1 001		
40	Hj. ATIN TESNAWATI. S.ST.Keb	Pembina/ IV a	Kasi Trantib
	NIP. 19691105 199101 2 002		
<b>KELURAHAN : PABUARAN</b>			
41	MARYANI, SE	Penata / III c	Kepala Kelurahan
	NIP. 19681011 200906 1 005		
42	SARIKAH, S.Sos, M.Si	Penata / III c	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19810513 200502 2 003		
43	ENDANG KUSNANDAR, SE	Penata Muda TK. I / III b	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19770710 200801 1 010		
44	JUWIZAT, S.Pd	Penata / III c	Kasi PMK
	NIP. 19760518 201101 2 001		
45	DIAN NURLELI	Pengatur Tk.I / II d	Pelaksana
	NIP. 19860313 200902 2 007		
<b>KELURAHAN : PASULUHAN</b>			
46	AAN JAJULI, S.Pd	Penata Tk. I / III d	Kepala Kelurahan
	NIP. 19790211 200801 1 004		
47	BINA SAEFUL CHAERUDIN, A.Md	Penata Muda / III a	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 1970905 200501 1 005		
48	RAKIMAN, SE	Penata Tk.I / III d	Kasi PMK
	NIP.19670101 199103 1 012		
49	KHALILULLAH, S.Pd	Penata / III c	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19650610 200502 1 001		
<b>KELURAHAN : TEGALSARI</b>			
50	SAIDAH, S.Pd	Penata Tk. I / III d	Kepala Kelurahan
	NIP. 19800820 201001 2 012		
51	Drs. MUKTAR	Penata Tk. I / III d	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19650714 200701 1 007		
52	TONI AHMADIANA, SKM	Penata / III c	Kasi PMK
	NIP. 1761028 200902 1 022		
<b>KELURAHAN : PIPITAN</b>			
53	TUTI SUMIYATI, S.Pd	Penata TK.I / III d	Kepala Kelurahan
	NIP. 19680222 200701 2 010		
54	SAIFUL, S.Pd	Penata / III c	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19700706 199003 1 003		

55	SRI MARGORINI, S.Pd, M.Si	Pembina Tk.I / IV b	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19661011 198603 2 005		
56	H.ACEP SURYADI, SKM	Penata Muda Tk I / III b	Kasi PMK
	NIP. 1750827 200604 2 002		
57	JUNAEDI, S.Pd	Penata TK.I / III d	Kasi Trantibum
	NIP.19761211 200801 1 003		
<b>KELURAHAN : LEBAKWANGI</b>			
58	JUPRAN, SE, MM	Penata TK.I / III d	Kepala Kelurahan
	NIP. 19680818 200906 1 005		
59	MOCHAMAD ANTONI NUGRAHA, A.Md	Penata Muda Tk.I / III b	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19870410 201101 1 001		
60	KOKOM KOMARURROHMAN, S.ST	Penata / III c	Kasi PMK
	NIP.19710603 200604 2 013		
61	SUPARTA WIJAYA, S.Pd	Penata / III c	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19851112 201101 1 001		

## 1. Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2

Tabel Eselon dan golongan Pegawai Kecamatan Walantaka

Ø Eselon IV	:	56	Orang
Ø Eselon III	:	2	Orang
Ø Eselon II	:	0	Orang
Ø Non Eselon	:	3	Orang
<b>JUMLAH</b>	:	<b>61</b>	<b>Orang</b>



Gambar 2.2 Posisi Kepangkatan Kecamatan Walantaka

## 2. Golongan Jabatan

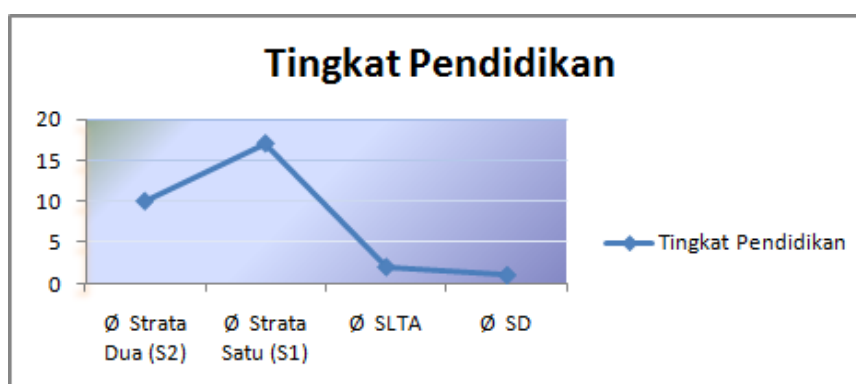
1. Golongan II	:	2	Orang
2. Golongan III	:	54	Orang
3. Golongan IV	:	5	Orang
4. Pelaksana	:	0	Orang
<b>JUMLAH</b>	:	<b>61</b>	<b>Orang</b>

Gambar 2.3  
Golongan Jabatan Kecamatan Walantaka



## 3. Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana	13 Orang
2.	Sarjana	42 Orang
3.	Diploma	5 Orang
4.	SMA	1 Orang
5.	SD	0 Orang
<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>45 Orang</b>



Gambar 2.4  
Tingkat Pendidikan Kecamatan Walantaka



**Tabel 2.1.1**  
**DAFTAR PENERIMAAN PENGADAAN BARANG**

**URUSAN :** **UNSUR KEWILAYAHAN**  
**BIDANG :** **BIDANG KEWILAYAHAN**  
**SKPD :** **KECAMATAN WALANTAKA**  
**UNIT :**  
**SUBUNIT :**

NO	TANGGAL	NOMOR KONTRAK NOMOR BAST NOMOR PENERIMAAN\ ID	NAMA REKENING/ BARANG	VOL	HARGA REKENING BELANJA	HARGA BELI BARANG	HARGA ATRIBUSI BARANG	HARGA PEROLEHAN BARANG	STATUS		VALID	POST
									ATRIB	DISTRI		
1	14-06-2022	111	Belanja Modal Jalan Lainnya		33.325.000,00							100%
	06-07-2022 06-07-2022	111 00018/7.01.31/VII/2022/ 1494	Jalan Desa - KP. NANGKABUGANG	1		33.325.000,00		33.325.000,00	TDK	TDK		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>33.325.000,00</b>	<b>33.325.000,00</b>		<b>33.325.000,00</b>				
2	12-07-2022	002	Belanja Modal Jalan Lainnya		33.325.000,00							100%
	11-08-2022 11-08-2022	002 00017/7.01.31/VIII/2022/ 1493	Jalan Desa - KP. Pabuaran	1		33.325.000,00		33.325.000,00	TDK	TDK		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>33.325.000,00</b>	<b>33.325.000,00</b>		<b>33.325.000,00</b>				
3	20-07-2022	002/Pokmas/Kiara/2022	Belanja Modal Jalan Lainnya		33.314.250,00							100%
	20-07-2022 15-08-2022	002/pokmas/kiara/2022 00016/7.01.31/VIII/2022/ 1451	Jalan Desa - Link. Citerep	1		33.314.250,00		33.314.250,00	TDK	TDK		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>33.314.250,00</b>	<b>33.314.250,00</b>		<b>33.314.250,00</b>				
4	26-07-2022	002/pokmas/2022	Belanja Modal Jalan Lainnya		33.402.000,00							100%
	16-08-2022 16-08-2022	003/pokmas/2022 00015/7.01.31/VIII/2022/ 1431	Jalan Desa - Link. Sidapurna	1		33.402.000,00		33.402.000,00	TDK	TDK		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>33.402.000,00</b>	<b>33.402.000,00</b>		<b>33.402.000,00</b>				

5	18-07-2022	002/pokmas/2022	Belanja Modal Jalan Lainnya		33.250.000,00							100%
	22-08-2022 22-08-2022	003/pokmas/2022 00014/7.01.31/VIII/2022/ 1430	Jalan Desa - Kp. Cibadak	1		33.250.000,00		33.250.000,00	TDK	TDK		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>		<b>33.250.000,00</b>				
6	14-07-2022	002/pokmas/2022	Belanja Modal Jalan Lainnya		33.250.000,00							100%
	11-08-2022 01-11-2022	003/pokmas/2022 00013/7.01.31/XI/2022/ 1427	Jalan Desa - Link. Kepuren	1		33.250.000,00		33.250.000,00	TDK	TDK		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>		<b>33.250.000,00</b>				
7	13-07-2022	008/pokmas/2022	Belanja Modal Jalan Lainnya		33.402.000,00							100%
	18-08-2022 20-08-2022	008/pokmas/2022 00012/7.01.31/VIII/2022/ 1425	Jalan Desa - Kp. Cibonteng	1		33.402.000,00		33.402.000,00	TDK	TDK		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>33.402.000,00</b>	<b>33.402.000,00</b>		<b>33.402.000,00</b>				
8	09-06-2022	001/pokmas/2022	Belanja Modal Jalan Lainnya		33.325.000,00							100%
	14-07-2022 14-07-2022	002/pokmas/2022 00011/7.01.31/VII/2022/ 1423	Jalan Desa - Link. Cibonteng	1		33.325.000,00		33.325.000,00	TDK	TDK		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>33.325.000,00</b>	<b>33.325.000,00</b>		<b>33.325.000,00</b>				
9	20-06-2022	002/pokmas/2022	Belanja Modal Jalan Lainnya		33.250.000,00							100%
	18-07-2022 18-07-2022	003/Pokmas/2022 00010/7.01.31/VII/2022/ 1420	Jalan Desa - LINK. TEGALKEMBANG	1		33.250.000,00		33.250.000,00	TDK	TDK		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>		<b>33.250.000,00</b>				
10	16-06-2022	001/POKMAS/VI/2022	Belanja Modal Jalan Lainnya		33.250.000,00							100%
	14-07-2022 14-07-2022	002/POKMAS/2022 00009/7.01.31/VII/2022/ 1419	Jalan Desa - KP. PESANGGRAHAN	1		33.250.000,00		33.250.000,00	TDK	TDK		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>		<b>33.250.000,00</b>				
11	20-06-2022	001/Pokmas/VI/2022	Belanja Modal Jalan Lainnya		33.250.000,00							100%
	18-07-2022 18-07-2022	002/Pokmas/VII/2022 00008/7.01.31/VII/2022/ 1414	Jalan Desa - LINK. JELALANG	1		33.250.000,00		33.250.000,00	TDK	TDK		

<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>		<b>33.250.000,00</b>				
12	15-06-2022	001/pokmas/VI/2022	Belanja Modal Jalan Lainnya		33.325.000,00							100%
	15-07-2022	002/Pokmas/2022	Jalan Desa - Link.	1		33.325.000,00		33.325.000,00	TDK	TDK		
	15-07-2022	00007/7.01.31/VII/2022/ 1412	Tamiang									
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>33.325.000,00</b>	<b>33.325.000,00</b>		<b>33.325.000,00</b>				
13	10-08-2022	001/pokmas/VIII/2022	Belanja Modal Jalan Lainnya		33.325.000,00							100%
	08-09-2022	002/pokmas/VIII/2022	Jalan Desa -	1		33.325.000,00		33.325.000,00	TDK	TDK		
	08-09-2022	00006/7.01.31/IX/2022/ 1397	Kp.Melandang RT/RW:006/003									
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>33.325.000,00</b>	<b>33.325.000,00</b>		<b>33.325.000,00</b>				
14	08-08-2022	001/pokmas/VIII/2022	Belanja Modal Jalan Lainnya		33.292.750,00							100%
	08-09-2022	002/pokmas/VIII/2022	Jalan Desa - Li	1		33.292.750,00		33.292.750,00	TDK	TDK		
	08-09-2022	00005/7.01.31/IX/2022/ 1396	nk. Cigabung									
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>33.292.750,00</b>	<b>33.292.750,00</b>		<b>33.292.750,00</b>				
15	15-02-2022	027	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		20.000.000,00							100%
	04-07-2022	027	Cetak Kubus Beton - cetakan Septic Tank	2		12.000.000,00		12.000.000,00	TDK	TDK		
	04-07-2022	00004/7.01.31/VII/2022/ 727	Cetak Kubus Beton - cetakan Septic Tank	2		2.000.000,00		2.000.000,00	TDK	TDK		
			Cetak Kubus Beton - cetakan Septic Tank	2		6.000.000,00		6.000.000,00	TDK	TDK		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>6</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>				
16	09-02-2022	027/01/spk.brg/pspk/ppk/kec.walantaka/2022	Belanja Modal Pompa		1.212.400,00							100%
			Belanja Modal Meja Kerja Pejabat		8.198.300,00							

			Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		17.182.000,00							
			Belanja Modal Mebel		2.799.500,00							
			Belanja Modal Alat Pendingin		30.593.200,00							
			Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran		2.149.400,00							
			Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		35.398.000,00							
			Belanja Modal Personal Computer		26.994.000,00							
			Belanja Modal Peralatan Personal Computer		24.824.800,00							
21-02-2022	027/01/spk.baphp/pspk/ppk/kec.walantaka/2022		Meja 1/2 Biro - olympic	1		909.000,00		909.000,00	TDK	TDK		
22-02-2022	00003/7.01.31/II/2022/ 703		Pompa Air - sanyo	1		1.102.181,00		1.102.181,00	TDK	TDK		
			Alat Pemadam/Portable - o	1		1.954.000,00		1.954.000,00	TDK	TDK		
			Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III - alba	1		2.799.500,00		2.799.500,00	TDK	TDK		
			Lemari Besi/Metal - ALBA	1		38.937.800,00		38.937.800,00	TDK	TDK		
			Printer (Peralatan Personal Komputer) - epson L3210	5		19.998.000,00		19.998.000,00	TDK	TDK		
			Sofa - mona	1		7.180.000,00		7.180.000,00	TDK	TDK		

			Sofa - mona	2		8.440.000,00		8.440.000,00	TDK	TDK		
			Note Book - lenovo	1		11.994.400,00		11.994.400,00	TDK	TDK		
			Meja Kerja Pejabat Eselon IV - oluypic	4		6.674.880,00		6.674.880,00	TDK	TDK		
			Scanner Facsimile - LENOVO	1		4.328.549,00		4.328.549,00	TDK	TDK		
			AC Split - sharp	1		1.818.880,00		1.818.880,00	TDK	TDK		
			AC Split - ALASAN	3		23.694.000,00		23.694.000,00	TDK	TDK		
			PC Unit - lenovo	1		14.999.600,00		14.999.600,00	TDK	TDK		
			AC Split - thosiba	1		4.520.810,00		4.520.810,00	TDK	TDK		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>25</b>	<b>149.351.600,00</b>	<b>149.351.600,00</b>		<b>149.351.600,00</b>				
17	07-02-2022	027/02/ND/KONSTR/WALANTAKA/KEC.WALANTAKA/2022	Belanja Modal Pagar			65.887.200,00						100%
	21-02-2022 22-02-2022	027/03/BASTHP/P/PPK/KONSTR/PSPKW/KEC.WALANTAKA/2022 00002/7.01.31/II/2022/ 687	Pagar Permanen - KANTOR KECAMATAN WALANTAKA	1		65.887.200,00		65.887.200,00	TDK	TDK		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>65.887.200,00</b>	<b>65.887.200,00</b>		<b>65.887.200,00</b>				
18	04-02-2022	027/03/SPK/KONSTR/PSPKW/PPP/KEC.WALANTAKA/2022	Belanja Modal Bangunan Parkir			26.057.000,00						100%
	14-02-2022 30-06-2022	027/03/KONSTR-BAPHP/KEC. WALANTAKA/2022 00001/7.01.31/VI/2022/ 686	Bangunan Tempat Parkir - JLN. CIRUAS-PETIR KM. 3 WALANTAKA	1		26.057.000,00		26.057.000,00	TDK	TDK		
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>26.057.000,00</b>	<b>26.057.000,00</b>		<b>26.057.000,00</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>47</b>	<b>727.581.800,00</b>	<b>727.581.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.581.800,00</b>				

### 2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Capaian indikator kinerja Kecamatan Walantaka Kota Serang dibandingkan target pada Renstra periode 2019-2023 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Kecamatan Walantaka memiliki 2 Indikator kinerja yaitu :

1. Capaian Kelurahan yang memenuhi standar kelurahan (sangat berkembang) dengan target 44,85% pada tahun 2023 sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 100%
2. Capaian Hasil Evaluasi LKJiP dengan target 75 (point BB) pada tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 70.79 (point b) *nilai sementara*

Sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa kinerja dari Kecamatan Walantaka selama periode renstra 2019-2023 sudah berjalan dengan baik, tetapi peningkatan kinerja masih perlu dilakukan pada periode selanjutnya dan menjadi tantangan bagi Kecamatan Walantaka dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Walantaka dari tahun 2019 – 2023 tertuang pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Walantaka**  
**Kota Serang Tahun 2019-2023**

Tujuan / Sasaran Strategis	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021						Target Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2022					
				K	Rp	K	Rp	% K	% R	K	Rp	K	RP	% K	% R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	nilai	77		78.14		101.48		80		82.01		102.51	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan		Hasil evaluasi LKjIP	nilai	48	30,649,737,365	51.25	28,190,924,198	106.77	91.98	50	19.657.859.935	66.26	19.370.251.375	132.52	98.54
	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	85	17,150,710,205	85	15,133,898,248	100.00	88.24	90	13,356,506,846	90	13,110,380,395	100.00	98.16
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dokumen	42	255,316,000	42	250,890,000	100.00	98.27	14	172,598,000	14	172,420,000	100.00	99.90
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PK, RENSTRA PERUBAHAN, RENJA Murni dan RENJA Perubahan	dokumen	12	62,782,000	12	59,050,000	100.00	94.06	4	43,198,000	4	43,198,000	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	dokumen	3	63,084,000	3	63,080,000	100.00	99.99	1	81,285,000	1	81,107,000	100.00	99.78
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	dokumen	3	13,120,000	3	13,120,000	100.00	100.00	1	8,050,000	1	8,050,000	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Murni	dokumen	3	12,040,000	3	12,040,000	100.00	100.00	1	4,342,000	1	4,342,000	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan dan Pergeseran	dokumen	6	14,440,000	6	14,340,000	100.00	99.31	2	4,588,000	2	4,588,000	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi LKPJ, LPPD, LkjiP, evlap dan lapbul	dokumen	12	43,540,000	12	42,950,000	100.00	98.64	4	21,435,000	4	21,435,000	100.00	100.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok profil daerah	dokumen	3	46,310,000	3	46,310,000	100.00	100.00	1	9,700,000	1	9,700,000	100.00	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan	dokumen	84	10,933,994,057	84	9,146,427,670	100.00	83.65	30	10,405,771,854	21	10,209,866,582	70.00	98.12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	36	10,164,176,362	36	8,396,667,670	100.00	82.61	12	10,189,336,854	3	9,993,508,582	25.00	98.08
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dok LK Unaudited dan LK Audited	dokumen	6	9,764,000	6	9,760,000	100.00	99.96	2	4,007,000	2	4,000,000	100.00	99.83
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah BA Rekonsiliasi Tk Kecamatan dan Kota	dokumen	42	760,053,695	42	740,000,000	100.00	97.36	16	212,428,000	16	212,358,000	100.00	99.97
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Kecamatan	dokumen	90	116,154,000	90	114,030,000	100.00	98.17	100	58,077,000	100	58,077,000	100.00	100.00
	Penata Usahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Dokumen Laporan BMD (barang Pakai Habis dan BM)	dokumen	90	116,154,000	90	114,030,000	100.00	98.17	30	58,077,000	30	58,077,000	100.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai Kecamatan	%	100	45,124,000	100	45,008,000	100.00	99.74	100	26,978,000	100	26,978,000	100.00	100.00

Tujuan / Sasaran Strategis	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021						Target Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2022					
				K	Rp	K	Rp	% K	% R	K	Rp	K	RP	% K	% R
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Peraturan Perundang-undangan	orang	135	45,124,000	135	45,008,000	100.00	99.74	45	26,978,000	45	26,978,000	100.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bulan	36	1,247,778,336	36	1,192,205,818	100.00	95.55	12	417,888,292	12	411,145,955	100.00	98.39
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan penyediaan kebutuhan alat listrik	bulan	36	33,021,368	36	31,230,524	100.00	94.58	12	1,955,668	12	1,955,668	100.00	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bulan	36	195,672,004	36	185,670,000	100.00	94.89	12	71,295,054	3	69,857,567	25.00	97.98
	Penyediaan Logistik Kantor	jumlah bulan penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bulan	36	255,232,000	36	240,232,000	100.00	94.12	12	117,304,000	12	116,292,000	100.00	99.14
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	bulan	36	164,658,964	36	149,529,294	100.00	90.81	12	15,070,570	12	10,851,720	100.00	72.01
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah bulan penyediaan Kunjungan Tamu Tk Kota	bulan	8	40,000,000	8	40,000,000	100.00	100.00	5	15,000,000	5	15,000,000	100.00	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan penyediaan kebutuhan SPPD Luar dan Dalam Daerah	bulan	36	559,194,000	36	545,544,000	100.00	97.56	12	197,263,000	12	197,189,000	100.00	99.96
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	24	555,077,012	24	551,620,000	100.00	99.38	6	268,010,000	6	263,515,800	100.00	98.32
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	unit	8	78,406,612	8	78,200,000	100.00	99.74	4	173,260,000	4	170,561,600	100.00	98.44
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana ruang kantor	unit	16	476,670,400	16	473,420,000	100.00	99.32	2	94,750,000	2	92,954,200	100.00	98.10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3,191,036,000	100	3,078,275,160	100.00	96.47	100	1,638,019,800	100	1,609,355,318	100.00	98.25
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	bulan	12	118,560,000	12	117,560,000	100.00	99.16	12	60,760,000	12	58,240,000	100.00	95.85
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan listrik yg dibayar	bulan	12	997,160,000	12	925,415,160	100.00	92.81	12	497,490,000	12	471,539,918	100.00	94.78
		Jumlah penyediaan publikasi	bulan	6		6		100.00		2		2		100.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebersihan kantor dan petugas keamanan	bulan	36	2,075,316,000	36	2,035,300,000	100.00	98.07	12	1,079,769,800	12	1,079,575,400	100.00	99.98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	806,230,800	100	755,441,600	100.00	93.70	100	369,163,900	100	359,021,740	100.00	97.25
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	38	304,942,000	38	266,656,800	100.00	87.45	10	142,439,500	10	133,297,340	100.00	93.58
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	34	129,808,800	34	129,808,800	100.00	100.00	34	119,904,400	34	119,904,400	100.00	100.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	unit	36	207,320,000	36	195,296,000	100.00	94.20	12	16,844,000	12	15,844,000	100.00	94.06
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah 32embag yang dipelihara	unit	16	164,160,000	16	163,680,000	100.00	99.71	1	89,976,000	1	89,976,000	100.00	100.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI SOP/SP/KETENTUAN	%	80	282,100,000	80	274,740,000	100.00	97.39	85	161,510,000	85	155,890,000	100.00	96.52
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	%	80	100,740,000	80	95,540,000	100.00	94.84	85	70,830,000	85	66,220,000	100.00	93.49



Tujuan / Sasaran Strategis	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021						Target Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2022					
				K	Rp	K	Rp	% K	% R	K	Rp	K	RP	% K	% R
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Musrenbang Tk Kecamatan	dokumen	3	56,740,000	3	54,040,000	100.00	95.24	1	55,830,000	1	51,220,000	100.00	91.74
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kelurahan yg dinilai dalam Lomba Kelurahan tk Kecamatan	kelurahan	3	44,000,000	3	41,500,000	100.00	94.32	1	15,000,000	1	15,000,000	100.00	100.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	80	181,360,000	80	179,200,000	100.00	98.81	85	90,680,000	85	89,670,000	100.00	98.89
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah SPPT PBB terdistribusi	tupi	126000	181,360,000	126000	179,200,000	100.00	98.81	42000	90,680,000	42000	89,670,000	100.00	98.89
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kategori kelurahan berkembang	%	50	10,866,119,000	55	10,601,244,350	110.00	97.56	55	5,738,445,373	67	5,703,813,980	121.82	99.40
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Capaian Pemberdayaan Kelurahan	%	80	10,387,391,500	80	10,152,516,850	100.00	97.74	80	5,504,675,623	80	5,478,434,230	100.00	99.52
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	dokumen	42	341,600,000	42	307,400,000	100.00	89.99	14	199,986,000	14	187,096,000	100.00	93.55
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan terbangun	lokus	42	422,020,000	42	421,345,350	100.00	99.84	14	560,868,026	14	560,825,026	100.00	99.99
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RT yg mengikuti KRLA	RT	252		252		100.00		84		84		100.00	
		Jumlah Masyarakat yg diberdayakan	orang	1457	9,623,771,500	1457	9,423,771,500	100.00	97.92	1457	4,743,821,597	1457	4,730,513,204	100.00	99.72
		Jumlah Balita dan Ibu Hamil yang mendapatkan pendampingan asupan gizi	orang	840		840		100.00		280		280		100.00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terbina	%	80	478,727,500	80	448,727,500	100.00	93.73	85	233,769,750	85	225,379,750	100.00	96.41
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Event yang diselenggarakan	event	0	0	0	0	0.00	0.00	2	106,426,000	2	105,416,000	100.00	99.05
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta Pelatihan 33 lembaga masyarakat	orang	106	478,727,500	106	448,727,500	100.00	93.73	106	127,343,750	106	119,963,750	100.00	94.20
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Capaian penanganan k3	%	70	1,460,000,000	70	1,323,361,600	100.00	90.64	75	7,910,000	75	6,750,000	100.00	85.34
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Capaian Laporan pelanggaran PERDA	%	0	0	0	0	0.00	0.00	75	7,910,000	75	6,750,000	100.00	85.34
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah posko yang dibentuk	posko	0	0	0	0			1	7,910,000	1	6,750,000	100.00	85.34
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Posko yang terfasilitasi	posko	14	1,460,000,000	14	1,323,361,600	100.00	90.64						
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	posko	1	1,205,575,000	1	1,111,706,600	100.00	92.21						
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org	45	254,425,000	45	211,655,000	100.00	83.19						
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Cakupan Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	80	890,808,160	80	857,680,000	100.00	96.28	85	393,487,716	85	393,417,000	100.00	99.98

Tujuan / Sasaran Strategis	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021						Target Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2022					
				K	Rp	K	Rp	% K	% R	K	Rp	K	RP	% K	% R
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	capaian penyelenggaraan event urusan pemerintahan umum	%	80	890,808,160	80	857,680,000	100.00	96.28	85	393,487,716	85	393,417,000	100.00	99.98
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah event PHBN yang diselenggarakan	event	6	196,671,730	6	176,500,000	100.00	89.74	2	76,995,865	2	76,981,000	100.00	99.98
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah event PHBI yang diselenggarakan	event	18	579,256,430	18	568,700,000	100.00	98.18	6	256,491,851	6	256,436,000	100.00	99.98
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah penyelenggaraan rakor forkopimcam	bulan	36	114,880,000	36	112,480,000	100.00	97.91	12	60,000,000	12	60,000,000	100.00	100.00

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Walantaka selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Walantaka 3 (tiga) tahun kedepan di antaranya:

1. Kelurahan sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur kelurahan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun kelurahan dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
4. Kecamatan Walantaka berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang, menuntut kerjasama antar wilayah antar daerah.
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higien dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Pilar ke satu STBM yaitu tidak buang air besar sembarangan. Untuk tahun 2023 masih terdapat 6 kelurahan yang belum odf atau open defecation free.

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Walantaka dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Walantaka berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.
2. Kecamatan Walantaka dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet yang sebagian PNS telah menguasai teknologi tersebut.
3. Kecamatan Walantaka berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan untuk 14 (empat belas) kelurahan di Kecamatan Walantaka.
4. Kecamatan Walantaka berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan.
5. Di Kecamatan Walantaka telah terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif, seperti kelompok-kelompok tani, kelompok ternak, kelompok-kelompok usaha rumahan yang sangat berpotensi dikembangkan, namun selama ini simpul-simpul tersebut relative kurang berhubungan dengan investor dari luar.
6. Pada tahun 2021 telah berjalan program inovasi WATUJAGA dengan target capaian odf untuk 14 kelurahan yang ada di Kecamatan Walantaka. Hingga akhir tahun 2022 telah tercapai 8 kelurahan yang telah dan akan deklarasi odf. Program ini merupakan peluang dalam mencapai odf se-Kecamatan Walantaka yang ditargetkan selesai pada tahun 2023.

**2.5** Kecamatan Walantaka tidak memiliki Standar Pelayanan minimal selama periode Renstra 2019-2023 sehingga pencapaian kinerjanya nihil, hal tersebut dapat dilihat pada table 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kecamatan Walantaka Kota Serang Tahun 2019 – 2023

No	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM	Indikator Kinerja SPM	Target Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun					
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	

N | H

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN WALANTAKA

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Serang saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi tiga tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama tiga tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Walantaka kepada masyarakat berkaca dari pelaksanaan pemerintahan selama tahun 2018-2020. Analisis isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Walantaka dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

##### **Bidang Sekretariat**

###### a. Masalah :

Kinerja kegiatan administrasi yang lambat

Faktor yang mempengaruhi :

Masih kurangnya sumber daya pegawai dalam penatausahaan keuangan dan administrasi perkantoran, serta kurangnya keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer dan sistem berbasis web di wilayah Kecamatan Walantaka

### **Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

a. Masalah :

Data Pemerintahan Umum dan Pertanahan Kelurahan yang belum terintegrasi

Faktor yang mempengaruhi :

Kurang dan rendahnya SDM personil pengelolaan data.

b. Masalah :

Pemerataan pembangunan yang belum sesuai skala prioritas Faktor yang mempengaruhi :

Kurang optimalnya koordinasi antara dinas teknis dengan pihak kecamatan dalam pemerataan pembangunan kelurahan;

### **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

a. Masalah :

Kurang optimalnya penyusunan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat

Faktor yang mempengaruhi :

Kurangnya SDM personil pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pengelola partisipasi masyarakat

### **Bidang Keamanan dan ketertiban**

a. Masalah :

Kinerja pelayanan masyarakat dalam upaya pengendalian Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan ( K3 ) yang belum optimal Faktor yang mempengaruhi :

Kurangnya personil dan sarana dalam pengelolaan K3

b. Masalah :

Adanya beberapa kasus kenakalan remaja serta pedagang kaki lima ( PKL ) yang mulai menempati bahu-bahu jalan

Faktor yang mempengaruhi :

Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan  
Kecamatan Walantaka

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	MASIH KURANGNYA KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT WALANTAKA	BELUM BAIKNYA IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN URUSAN	Realisasi Penilaian Kondisi Kelurahan dalam keadaan baik
			Realisasi Identifikasi Permasalahan urusan yang ditangani

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Realisasi Inventarisasi Permasalahan urusan yang ditangani
		BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN PUBLIK MASYARAKAT	Realisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan yang ditangani
			Pengendalian tepat waktu sesuai SOP yang ditangani
			Identifikasi masalah pelayanan tepat waktu pelayanan yang ditangani
			Penyelesaian masalah pelayanan tepat waktu
		MASIH KURANGNYA KOORDINASI DAN INTEGRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Masalah Urusan yang telah dikoordinasikan terhadap Inventarisasi Permasalahan
			Masalah Urusan yang telah diselesaikan terhadap Inventarisasi Permasalahan
			Kegiatan Pembangunan yang terintegrasi dalam penyelesaian masalah terhadap Total kegiatan

### 3.2 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan telah diatur terinci dalam program dan kegiatan pada Kecamatan Walantaka yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang.

Sedangkan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Belum adanya program di Kecamatan Walantaka yang terkait langsung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, namun demikian apabila ada program/kegiatan yang berkaitan dengan Urusan Kewilayahan maka pelaksanaannya akan berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Serang.

### 3.3 ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penentuan isu strategis ini, Kecamatan Walantaka melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal dimana isu-isu ini digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan Kecamatan Walantaka lebih baik. Sisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan isu strategis adalah :

1. Isu Strategis RPJPD 2008-2025, pada isu strategis **ke-empat** tentang Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih dengan Permasalahan pokok :
  - Kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
  - Kualitas dan daya saing pelayanan publik;
2. Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten, ada pada Isu strategis Tata Kelola Pemerintahan dengan fokus yaitu ; Hasil Evaluasi LKJIP dan Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan.

Isu strategis pada perubahan renstra merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Walantaka dimasa datang berkaca dari berjalannya pemerintahan selama dua tahun terakhir di tingkat kecamatan. Identifikasi isu strategis pelayanan Kecamatan Walantaka dilakukan dengan menggunakan metode diskusi yang tidak lepas dari isu strategis dalam pembangunan di Kota Serang. Adapun daftar isu strategis yang dihasilkan dari diskusi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN WALANTAKA

NO	ISU-ISU STRATEGIS
1	2
1	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2	Peningkatan kualitas sanitasi berbasis masyarakat
3	Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
4	Aparatur yang berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5	Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
6	Pelayanan publik yang berkualitas
7	Penataan Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan
8	Revitalisasi sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta UKM dan Koperasi guna membangkitkan perekonomian masyarakat pasca pandemi covid-19



Penentuan isu strategis merupakan hasil identifikasi masalah yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan dalam mendukung misi keempat Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Dengan menganalisis Daftar Permasalahan, Isu Strategis Perubahan RPJMD Kota Serang serta faktor Penghambat dan Pendorong Urusan Kewilayahan, maka dapat dirumuskan isu strategis Kecamatan Walantaka pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018-2023

No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018-2023	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	3	-4	-5
	Misi 4 Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih			
1	Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	terkendala pada kesadaran masyarakat untuk membayar PBB	kurang pahamnya masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak	adanya peraturan yang memberikan ruang untuk masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kelurahan
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	kebutuhan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat pasca pandemi	minimnya anggaran	sebagian masyarakat masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat baik bantuan langsung tunai maupun paket sembako dalam menutupi kebutuhan ekonominya
		pengentasan rendahnya sanitasi masyarakat yang tidak memiliki jamban didalam rumah	minimnya anggaran	menggalakan program swadaya masyarakat dalam membangun jamban keluarga dengan WATU JAGA (Walantaka Bersatu Atasi Jamban Keluarga)

No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018-2023	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	kegiatan yang berkaitan dengan Kampung Sehat, kampung tematik dan Kota Layak Anak tidak dianggarkan	minimnya anggaran	adanya kebijakan pemerintah pusat alokasi anggaran pada tingkat kelurahan sehingga pencapaian indikator tersebut bisa langsung menyentuh target sasaran
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan daerah yang masih rendah	terbentur dengan peraturan mengenai pelimpahan kewenangan	fokus pada pelaporan tindak pelanggaran perda dan usulan sosialisasi peraturan daerah bagi masyarakat ke OPD teknis
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	menjaga kelestarian budaya, harmonisasi masyarakat dan etos gotong royong	masyarakat yang heterogen dan generasi muda yang terkontaminasi perkembangan gadget	menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi stimulan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian budaya

Isu strategis digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan Kecamatan Walantaka lebih baik. Untuk itu diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Mengikuti isu strategis yang sedang terjadi didunia dalam lingkup Kecamatan Walantaka adalah adanya Sejak awal Tahun 2020, terjadi bencana yang melanda dunia yaitu penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara di dunia. Data terbaru di Kecamatan Walantaka tercatat pada tanggal 29 April 2021 sebanyak 156 orang dinyatakan positif, 132 orang dirawat, 21 orang sembuh dan 3 orang meninggal dunia (sumber: infocorona.serangkota.go.id)
- b. Meningkatkan Penataan Pemerintahan Kelurahan dan

Kecamatan melalui Identifikasi dan Inventarisasi Masalah, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Urusan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PATEN di kecamatan Walantaka.

- c. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui Identifikasi dan Inventarisasi Masalah, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Urusan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PATEN di kecamatan Walantaka.
- d. Meningkatkan Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat melalui Identifikasi dan Inventarisasi Masalah, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Urusan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PATEN di kecamatan Walantaka.
- e. Meningkatkan ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan masyarakat melalui Identifikasi dan Inventarisasi Masalah, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Urusan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PATEN di kecamatan Walantaka.
- f. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui Identifikasi dan Inventarisasi Masalah, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Urusan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PATEN di kelurahan dan kecamatan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN WALANTAKA**

Kecamatan Walantaka menetapkan 2 tujuan yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Walantaka dengan indikator tujuan Capaian Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Walantaka, dalam hal ini Kecamatan Walantaka Kota Serang diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga Rencana Pembangunan Daerah pemerintah Kota Serang dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Walantaka menetapkan 3 sasaran strategis :

1. Meningkatnya Capaian Kinerja Utama Kecamatan Walantaka dengan indikator sasaran Rata-rata Tingkat Capaian IKU Kecamatan Walantaka
2. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
3. Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan pada Kecamatan dengan indikator sasaran Presentase Kelurahan kategori cepat berkembang
  - Keterkaitan antara RPD Kota Serang Tahun 2024-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Walantaka Kota Serang ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KONDISI AKHIR RENSTRA
							2024	2025	2026	
							Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	12	14	16	18
Kewilayahan										
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Walantaka				Nilai AKIP Kecamatan Walantaka	point	72,21	73,65	75,13	75,13
		Meningkatnya Capaian Kinerja Utama Kecamatan Walantaka								
	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Publik pada Tingkat Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Point	85	85	87	87
		Meningkatnya Kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Point	88,64	90,41	92,22	92
		Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan pada Kecamatan			Presentase Kelurahan kategori cepat berkembang	point	57,14	61,43	75,71	75,71



Tabel 4.2  
Cascading Kinerja Perangkat Daerah

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program/Kegiatan/	Indikator Program/Kegiatan/	Unit Kerja Penanggung Jawab
		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Walantaka	Nilai AKIP Kecamatan Walantaka			
Meningkatnya Capaian Kinerja Utama Kecamatan Walantaka	Rata-rata Tingkat Capaian IKU Kecamatan Walantaka			
Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Publik pada Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan			
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan			

<b>Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan pada Kecamatan</b>	<b>Presentase Kelurahan kategori cepat berkembang</b>			
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai SOP/SP/Ketentuan</b>	
		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terfasilitasi</b>	
		Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	



		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>		<b>300.000.000</b>
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-
		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	<b>300.000.000</b>

		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>+F25</b>	<b>285.274.000</b>
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<b>285.274.000</b>
				-
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KELURAHAN</b>	<b>Indeks Profil Kelurahan</b>	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Walantaka</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	

		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cigoong</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Nyapah</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47.652.460
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pangampelan</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kiara</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pager Agung</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kalodran</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kepuren</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Teritih</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pabuaran</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasuluhan</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalsari</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pipitan</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lebakwangi</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Presentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan</b>	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	383.819.656
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	436.788.014
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	



		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	209.900.000
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan (Kelurahan Walantaka)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Walantaka)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Cigoong)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	

		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Cigoong)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Nyapah)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Nyapah)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Pengampelan)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	

		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Pengampelan)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Kiara)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Kiara)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Pager Agung)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	

		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Pager Agung)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Pager Kalodran)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Kalodran)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	

		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Kepuren)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( Kelurahan Kepuren)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Teritih)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (kelurahan Teritih)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	

		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Pabuaran)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Pabuaran)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Pasuluhan)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Pasuluhan)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	

		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Tegalsari)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Tegalsari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Pipitan)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	

		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Pipitan)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Lebakwangi)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Lebakwangi)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	



		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Presentase gangguan trantibum yang terselesaikan</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan K3</b>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<b>24.576.750</b>
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Presentase Penerapan dan penegakan Perda dan Perkada</b>	
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<b>40.287.665</b>

		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Presentase penyelenggaraan pemerintahan umum dikecamatan</b>	
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan/ event pemerintahan umum yang dilaksanakan kecamatan</b>	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	97.804.361

		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	320.961.936
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	314.450.000
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan</b>	
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.779.252
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31.198.101.060
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	288.200.358
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Kecamatan</b>	192.061.700
		Penata Usahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	192.061.700
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kehadiran pegawai Kecamatan</b>	98.226.898
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98.226.898

		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>747.379.572</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4087356
		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	



		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN WALANTAKA</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.079.760
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	

		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Walantaka)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN CIGOONG</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	

		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33.788.480
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	

		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	

		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Cigoong)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	



		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN NYAPAH</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.079.760
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	

		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Nyapah)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN PANGAMPELAN</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	

		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33.788.480
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	

		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Pengampelan)</b>	Jumlah Posko yang terfasilitasi	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	



		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN KIARA</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.079.760
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	

		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Kiara)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN PAGER AGUNG</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.079.760
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	



		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	

		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Pager Agung)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN KALODRAN</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33.788.480
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Kalodran)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN KEPUREN</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.079.760
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	



		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Kepuren)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN TERITIH</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33.788.480
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Teritih)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN PABUARAN</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33.788.480
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	



		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Pabuaran)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN PASULUHAN</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	

		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.807.960
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	

		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Pasuluhan)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN TEGALSARI</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	

		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33.788.480
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	

		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	



		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Tegalsari)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN PIPITAN</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33.788.480
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Pipitan)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	

		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN LEBAKWANGI</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33.788.480
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	



		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Lebakwangi</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah kebijakan**

Perencanaan ataupun proses perencanaan yang telah disusun tentunya harus memiliki strategi sebagai aplikasi langsung di lapangan. Strategi ini kemudian diperkuat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi tersebut sebagai langkah penguatan terhadap Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Baik penetapan strategi maupun kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Walantaka akan mempertimbangkan keadaan baik Internal ataupun Eksternal.

Strategi dan arah kebijakan merupakan derivasi dari tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Strategi memuat rumusan tindak yang lebih taktis dan pragmatis dalam menerjemahkan sasaran dalam RPJMD. Sementara arah kebijakan memuat panduan tindak yang lebih konkret yang pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Arah kebijakan juga merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Dengan demikian tujuan dan sasaran daerah harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan, termasuk tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Berikut tabel 5.1 yang menunjukkan keterhubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan :

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya								
MISI ke-4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					Program
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan	Tata kelola Pemerintahan yang baik melalui Tata pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan, Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Pemberdayaan Masyarakat kelurahan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan pada Masyarakat Walantaka	Mempersiapkan data dan rencana Tata Pemerintahan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dengan upaya forum konsultasi publik dan pengadaan sistem aplikasi data base internal pemerintahan	Menguatkan proses Tata Pemerintahan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dengan melengkapi komponen standar pelayanan dan menguatkan data base internal pemerintahan	Mengoptimalkan Pemerintahan Umum melalui Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional dan Nasional dengan mensinergikan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	<b>Pencapaian kinerja</b> Pemerintahan Umum melalui Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional dan Nasional dengan mensinergikan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	<b>Pencapaian kinerja</b> Pemerintahan Umum melalui Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional dan Nasional dengan mensinergikan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	

VISI : Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya								
MISI ke-4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					Program
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Mempersiapkan data dan rencana Kesejahteraan Sosial melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan sosial dan senantiasa menggiatkan masyarakat dalam kehidupan berkeagamaan dan sosial kemasyarakatan	Menguatkan proses Kesejahteraan Sosial melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan sosial dan senantiasa menggiatkan masyarakat dalam kehidupan berkeagamaan dan sosial kemasyarakatan	Mengoptimalkan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, peningkatan efektifitas kegiatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<b>Pencapaian kinerja</b> Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, peningkatan efektifitas kegiatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<b>Pencapaian kinerja</b> Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, peningkatan efektifitas kegiatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Mempersiapkan data dan rencana Ekonomi dan Pembangunan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan rekomendasi perekonomian dan pembangunan	Menguatkan proses Ekonomi dan Pembangunan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dan pelaksanaan Pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat Walantaka				
			Mempersiapkan data dan rencana Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dan Pelaksanaan Pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat Walantaka	Menguatkan proses Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dan Pelaksanaan Pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat Walantaka	<b>Mengoptimalkan</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<b>Pencapaian kinerja</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<b>Pencapaian kinerja</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

VISI : Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya								
MISI ke-4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					Program
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Mempersiapkan data dan rencana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dan Pelaksanaan Pembangunan untuk kualitas pelayanan pada masyarakat Walantaka	Menguatkan proses Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui Tindak lanjut permasalahan, Kualitas Pelayanan PATEN dan Pelaksanaan Pembangunan untuk kualitas pelayanan pada masyarakat Walantaka	Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pencapaian kinerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pencapaian kinerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Walantaka guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Walantaka yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024-2026 meliputi:

#### **A. Rencana Program**

- Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Walantaka Kota Serang selama tahun 2024-2026 antara lain:
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

#### **B. Rencana Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Walantaka Kota Serang Tahun 2024-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Walantaka. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Walantaka tahun 2024-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Walantaka Sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889), Rumusan dan Definisi Operasional Indikator Renstra Perangkat Daerah. indikator Kecamatan Walantaka disajikan pada tabel berikut

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB				
							2024		2025		2026		Tar get	Rp		Tar get	Rp	Tar get	Rp
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp							
							12	13	14	15	16	17	18	19		20			
Kewilayahan																			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Walantaka				Nilai AKIP Kecamatan Walantaka	point	72,21	20.859.442.894	73,65	21.909.442.894	75,13	23.345.742.894	75,13	104.498.718.627					
		Meningkatnya Capaian Kinerja Utama Kecamatan			Rata-rata Tingkat Capaian IKU Kecamatan Walantaka	Point	100		100		100		100						

		<b>Walantaka</b>												
	<b>Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Publik pada Tingkat Kecamatan</b>				<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan</b>	<b>Point</b>	<b>85</b>		<b>85</b>		<b>87</b>		<b>87</b>	
		<b>Meningkatnya Kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan</b>			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan</b>	<b>Point</b>	<b>88,64</b>		<b>90,41</b>		<b>92,22</b>		<b>92</b>	

		Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan pada Kecamatan			Presentase Kelurahan kategori cepat berkembang	point	57,14		61,43		75,71		75,71		
			7.01.02.2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai SOP/SP/Ketentuan	%	90	275.798.000	95	282.714.100	97	291.784.810	97	1.145.886.910	
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terfasilitasi	%	85	69.500.000	86	73.150.000	87	80.465.000	87	338.355.000	#####
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	Laporan	1	53.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	5	246.740.000	#####

					dan Instansi Vertikal Terkait										
			7.01.02.2. 01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	14	16.500.000	14	18.150.000	14	19.965.000	70	91.615.000	#####
			7.01.02.2. 02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	%	<b>0</b>	<b>12.661.000</b>	<b>100</b>	<b>13.927.100</b>	<b>100</b>	<b>15.319.810</b>	<b>100</b>	<b>41.907.910</b>	#####
			7.01.02.2. 02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	12.661.000	1	13.927.100	1	15.319.810	3	41.907.910	#####

			7 01 02 2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>				<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.00 0</b>		<b>300.000.00 0</b>	<b>#####</b>
			7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen									-
			7 01 02 2.03 02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit		100.000.000		100.000.000		100.000.00 0		300.000.00 0	<b>#####</b>
			7.01.02.2. 04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>+F25</b>	%	<b>85</b>	<b>93.637.000</b>	<b>85</b>	<b>95.637.000</b>	<b>85</b>	<b>96.000.000</b>	<b>85</b>	<b>465.624.00 0</b>	<b>#####</b>

			7.01.02.2. 04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	420 00	93.637.000	420 00	95.637.000	### #	96.000.000	### ##	465.624.00 0	#####
															-
			7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KELURAHAN</b>	<b>Indeks Profil Kelurahan</b>	<b>Point</b>	<b>60</b>	<b>5.573.400.5 89</b>	<b>70</b>	<b>5.936.523.4 94</b>	<b>80</b>	<b>6.293.157. 063</b>	<b>80</b>	<b>28.425.656 .051</b>	
			7.01.03.2. 02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Walantaka</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	<b>%</b>	90	<b>295.777.500</b>	90	<b>310.555.250</b>	90	<b>329.860.77 5</b>	90	<b>1.489.478. 245</b>	
			7.01.03.2. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyara katan	1	15.345.000	1	16.879.500	1	18.567.450	5	75.691.950	
			7.01.03.2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	37.432.500	4	41.175.750	4	45.293.325	23	171.551.57 5	

			7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	0	243.000.000	0	252.500.000	40	266.000.000	200	1.242.234.720
			7.01.03.2. 02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cigoong</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	%	<b>90</b>	<b>342.527.682</b>	<b>90</b>	<b>366.704.728</b>	90	<b>383.675.200</b>	90	<b>1.724.649.503</b>
			7.01.03.2. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	15.015.000	1	16.516.500	1	18.168.150	5	74.299.650
			7.01.03.2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	39.262.025	4	43.188.228	4	47.507.050	23	177.650.053
			7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	40	288.250.657	40	307.000.000	40	318.000.000	280	1.472.699.800



			7.01.03.2. 02	<b>Kegiatan PEMBERDAYAAN Kelurahan Nyapah</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	%	90	317.837.200	90	342.320.920	90	376.853.012	90	1.631.447.852	
			7.01.03.2. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakan	1	15.455.000	1	17.000.500	1	18.700.550	5	76.156.050	
			7.01.03.2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	39.382.200	4	43.320.420	4	47.652.462	23	178.157.082	#####
			7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	40	263.000.000	40	282.000.000	40	310.500.000	280	1.377.134.720	
			7.01.03.2. 02	<b>Kegiatan PEMBERDAYAAN Kelurahan Pangampelan</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	%	90	410.622.302	90	439.850.100	90	470.135.110	90	2.096.998.276	
			7.01.03.2. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	Lembaga Kemasyarakan	1	13.376.000	1	14.713.600	1	16.184.960	5	67.384.560	

				Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
			7.01.03.2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	39.215.000	4	43.136.500	4	47.450.150	23	177.451.65 0	
			7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	40	358.031.302	40	382.000.000	40	406.500.00 0	280	1.852.162. 066	
			7.01.03.2. 02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kiara</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	%	90	<b>452.955.635</b>	90	<b>477.449.199</b>	90	<b>502.494.11 9</b>	90	<b>2.295.319. 529</b>	
			7.01.03.2. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyara katan	1	15.345.000	1	16.879.500	1	18.567.450	5	75.691.950	
			7.01.03.2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	39.285.675	4	43.214.243	4	47.535.667	23	177.749.83 4	

			7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	40	398.324.960	40	417.355.456	40	436.391.002	280	2.041.877.745	
			7.01.03.2. 02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pager Agung</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	%	90	<b>488.055.192</b>	90	<b>522.055.711</b>	90	<b>551.485.200</b>	90	<b>2.556.303.498</b>	
			7.01.03.2. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakan	1	14.905.000	1	16.395.500	1	18.035.050	2	73.735.550	
			7.01.03.2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	39.215.000	4	43.136.500	4	47.450.150	11	220.124.325	
			7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	40	433.935.192	40	462.523.711	40	486.000.000	40	2.262.443.623	

			7.01.03.2. 02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kalodran</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	%	90	<b>395.998.333</b>	90	<b>418.798.167</b>	90	<b>441.977.98 3</b>	90	<b>2.012.115. 695</b>	
			7.01.03.2. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyara katan	1	14.889.600	1	16.378.560	1	18.016.416	2	73.670.576	
			7.01.03.2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	72.286.733	4	79.515.407	4	87.466.947	11	316.984.29 9	
			7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	40	308.822.000	40	322.904.200	40	336.494.62 0	40	1.621.460. 820	
			7.01.03.2. 02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kepuren</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	%	90	<b>427.670.000</b>	90	<b>462.637.000</b>	90	<b>482.150.70 0</b>	90	<b>2.196.471. 705</b>	
			7.01.03.2. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	Lembaga Kemasyara katan	1	15.455.000	1	17.000.500	1	18.700.550	2	76.156.050	

				Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
			7.01.03.2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	39.215.000	4	43.136.500	4	47.450.150	11	177.451.65 0	
			7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	40	373.000.000	40	402.500.000	40	416.000.00 0	40	1.942.864. 005	
			7.01.03.2. 02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Teritih</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	%	90	<b>716.957.200</b>	90	<b>746.852.920</b>	90	<b>771.788.21 2</b>	90	<b>3.632.854. 459</b>	
			7.01.03.2. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyara katan	1	14.575.000	1	16.032.500	1	17.635.750	2	72.343.250	
			7.01.03.2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	39.382.200	4	43.320.420	4	47.652.462	11	178.157.08 2	

			7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	40	663.000.000	40	687.500.000	40	706.500.000	40	3.382.354.127
			7.01.03.2. 02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pabuaran</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	<b>%</b>	90	<b>310.377.195</b>	90	<b>333.614.915</b>	90	<b>367.276.406</b>	90	<b>1.601.524.331</b>
			7.01.03.2. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakan	1	14.036.000	1	15.439.600	1	16.983.560	2	71.419.160
			7.01.03.2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	73.341.195	4	80.675.315	4	88.742.846	11	321.433.171
			7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	40	223.000.000	40	237.500.000	40	261.550.000	40	1.208.672.000

			7.01.03.2. 02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasuluhan</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	%	90	352.187.996	90	381.606.797	90	401.067.77 7	90	1.794.812. 530	
			7.01.03.2. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyara katan	1	14.168.000	1	15.584.800	1	17.143.280	2	69.826.080	
			7.01.03.2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	39.297.500	4	43.227.250	4	47.549.975	11	177.799.72 5	
			7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	40	298.722.496	40	322.794.747	40	336.374.52 2	40	1.547.186. 725	
			7.01.03.2. 02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalsari</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	%	<b>90</b>	<b>278.017.692</b>	<b>90</b>	<b>297.019.462</b>	<b>90</b>	<b>327.021.40 8</b>	<b>90</b>	<b>1.420.608. 282</b>	
			7.01.03.2. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	Lembaga Kemasyara katan	1	15.015.000	1	16.516.500	1	18.168.150	2	73.399.650	

				Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
			7.01.03.2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	39.297.500	4	43.227.250	4	47.549.975	11	177.799.72 5	
			7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	40	223.705.192	40	237.275.712	40	261.303.28 3	40	1.169.408. 907	
			7.01.03.2. 02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pipitan</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	%	<b>90</b>	<b>457.169.192</b>	<b>90</b>	<b>480.986.111</b>	<b>90</b>	<b>501.394.72 2</b>	<b>90</b>	<b>2.281.764. 745</b>	
			7.01.03.2. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyara katan	1	14.135.000	1	15.548.500	1	17.103.350	2	70.586.850	
			7.01.03.2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	39.215.000	4	43.136.500	4	47.450.150	11	177.451.65 0	



			7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	40	403.819.192	40	422.301.111	40	436.841.222	40	2.033.726.245
			7.01.03.2. 02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lebakwangi</b>	<b>Presentase pelaksanaan pemberdayaan dikelurahan</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>327.247.469</b>	<b>90</b>	<b>356.072.216</b>	<b>90</b>	<b>385.976.438</b>	<b>90</b>	<b>1.691.307.401</b>
			7.01.03.2. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakan	1	14.091.000	1	15.500.100	1	17.050.110	2	71.651.210
			7.01.03.2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	39.297.500	4	43.227.250	4	47.549.975	11	177.799.725
			7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	40	273.858.969	40	297.344.866	40	321.376.353	40	1.441.856.466

			7.01.03.2. 03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Presentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan</b>	%	100	<b>247.917.725</b>	100	<b>272.709.498</b>	100	<b>299.980.44 7</b>	<b>1.285.351. 170</b>	
			7.01.03.2. 03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyara katan	3	115.957.600	3	127.553.360	3	140.308.69 6	489.235.65 6	#####
			7.01.03.2. 03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	148	131.960.125	148	145.156.138	148	159.671.75 1	254 4	#####
			7.01.03.2. 03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	14	-	14	-	14	-	0 -	
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	%	100	<b>65.000.000</b>	100	<b>69.000.000</b>	100	<b>75.900.000</b>	<b>209.900.00 0</b>	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat	Keluarga	100	65.000.000	100	69.000.000	100	75.900.000	209.900.00 0	#####

				Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	%		<b>468.000.000</b>		<b>508.500.000</b>		<b>555.150.000</b>		<b>985.650.000</b>	
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan (Kelurahan Walantaka)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	%	<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>	<b>29.500.000</b>	<b>100</b>	<b>32.150.000</b>	<b>100</b>	<b>49.650.000</b>	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Walantaka)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	20	15.000.000	20	16.500.000	20	18.150.000	20	49.650.000	

				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			12.000.000		13.000.000		14.000.000			
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Cigoong)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>	<b>29.500.000</b>	<b>100</b>	<b>32.150.000</b>	<b>100</b>	<b>49.650.000</b>	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Cigoong)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	20	15.000.000	20	16.500.000	20	18.150.000	20	49.650.000	

				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			12.000.000		13.000.000		14.000.000			
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Nyapah)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>	<b>29.500.000</b>	<b>100</b>	<b>32.150.000</b>	<b>100</b>	<b>49.650.000</b>	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Nyapah)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	20	15.000.000	20	16.500.000	20	18.150.000	20	49.650.000	

				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			12.000.000		13.000.000		14.000.000			
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Pengampelan)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>	<b>29.500.000</b>	<b>100</b>	<b>32.150.000</b>	<b>100</b>	<b>49.650.000</b>	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Pengampelan)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	20	15.000.000	20	16.500.000	20	18.150.000	20	49.650.000	

				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			12.000.000		13.000.000		14.000.000				
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Kiara)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	%	<b>100</b>	<b>57.000.000</b>	<b>100</b>	<b>59.000.000</b>	<b>100</b>	<b>64.600.000</b>	<b>100</b>	<b>141.600.000</b>	<b>0</b>	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Kiara)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	60	45.000.000	60	46.000.000	60	50.600.000	60	141.600.000	0	

				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			12.000.000		13.000.000		14.000.000			
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Pager Agung)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>	<b>29.500.000</b>	<b>100</b>	<b>32.150.000</b>	<b>100</b>	<b>49.650.000</b>	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Pager Agung)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	20	15.000.000	20	16.500.000	20	18.150.000	20	49.650.000	



				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			12.000.000		13.000.000		14.000.000			
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Pager Kalodran)</b>	<b>Presentase keluarga Terasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>57.000.000</b>	<b>100</b>	<b>62.500.000</b>	<b>100</b>	<b>68.450.000</b>	<b>100</b>	<b>148.950.000</b>	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Kalodran)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	60	45.000.000	60	49.500.000	60	54.450.000	60	148.950.000	

				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			12.000.000		13.000.000		14.000.000			
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Kepuren)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	%	<b>100</b>	<b>57.000.000</b>	<b>100</b>	<b>62.500.000</b>	<b>100</b>	<b>68.450.000</b>	<b>100</b>	<b>148.950.000</b>	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( Kelurahan Kepuren)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	60	45.000.000	60	49.500.000	60	54.450.000	60	148.950.000	

				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			12.000.000		13.000.000		14.000.000			
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Teritih)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	%	<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>	<b>29.500.000</b>	<b>100</b>	<b>32.150.000</b>	<b>100</b>	<b>49.650.000</b>	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (kelurahan Teritih)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	20	15.000.000	20	16.500.000	20	18.150.000	20	49.650.000	

				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			12.000.000		13.000.000		14.000.000			
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Pabuaran)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>	<b>29.500.000</b>	<b>100</b>	<b>32.150.000</b>	<b>100</b>	<b>49.650.000</b>	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Pabuaran)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	20	15.000.000	20	16.500.000	20	18.150.000	20	49.650.000	

				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			12.000.000		13.000.000		14.000.000			
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Pasuluhan)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>	<b>29.500.000</b>	<b>100</b>	<b>32.150.000</b>	<b>100</b>	<b>49.650.000</b>	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Pasuluhan)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	20	15.000.000	20	16.500.000	20	18.150.000	20	49.650.000	

				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			12.000.000		13.000.000		14.000.000			
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Tegalsari)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>	<b>29.500.000</b>	<b>100</b>	<b>32.150.000</b>	<b>100</b>	<b>49.650.000</b>	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Tegalsari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	20	15.000.000		16.500.000		18.150.000		49.650.000	

				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			12.000.000		13.000.000		14.000.000			
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Pipitan)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	%	<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>	<b>29.500.000</b>	<b>100</b>	<b>32.150.000</b>	<b>100</b>	<b>49.650.000</b>	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Pipitan)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	20	15.000.000		16.500.000		18.150.000		49.650.000	

				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			12.000.000		13.000.000		14.000.000			
				<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan Lebakwangi)</b>	<b>Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>	<b>29.500.000</b>	<b>100</b>	<b>32.150.000</b>	<b>100</b>	<b>49.650.000</b>	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Lebakwangi)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	20	15.000.000		16.500.000		18.150.000		49.650.000	



				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			12.000.000		13.000.000		14.000.000			
			#####	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Presentase gangguan trantibum yang terselesaikan</b>	%	<b>100</b>	<b>19.596.500</b>	<b>100</b>	<b>21.556.150</b>	<b>100</b>	<b>23.711.765</b>	<b>100</b>	<b>171.613.215</b>	
			7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan K3</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>14</b>	<b>7.425.000</b>	<b>14</b>	<b>8.167.500</b>	<b>14</b>	<b>8.984.250</b>	<b>14</b>	<b>131.325.550</b>	
			7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	14	7.425.000	14	8.167.500	14	8.984.250	14	96.650.550	#####

			7.01.04.2. 01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		-	-	-	0	34.675.000			
			7.01.04.2. 02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Presentase Penerapan dan penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>80</b>	<b>12.171.500</b>	<b>85</b>	<b>13.388.650</b>	<b>90</b>	<b>14.727.515</b>	<b>90</b>	<b>40.287.665</b>	
			7.01.04.2. 02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	12.171.500	1	13.388.650	1	14.727.515	2	40.287.665	#####
			#####	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN</b>	<b>Presentase penyelenggaraan pemerintahan umum dikecamatan</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>411.087.850</b>	<b>85</b>	<b>452.196.635</b>	<b>87</b>	<b>533.716.297</b>	<b>75</b>	<b>2.224.257.782</b>	

				<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>											
			7.01.05.2. 01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan/ event pemerintahan umum yang dilaksanakan kecamatan</b>	<b>Event</b>	75	<b>411.087.850</b>	75	<b>452.196.635</b>	75	<b>533.716.29 7</b>	75	<b>2.224.257. 782</b>	
			7.01.05.2. 01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Orang	2	98.830.050	2	108.713.055	2	97.804.361	2	470.578.46 6	#####

				Kesatuan Republik Indonesia	Kesatuan Republik Indonesia										
			7.01.05.2. 01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	6	217.257.800	6	238.983.580	6	320.961.936	6	1.322.989.316	#####
			7.01.05.2. 01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum	Dokumen/ Org	1	95.000.000	1	104.500.000	1	114.950.000	1	430.690.000	#####

				Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
			7.01.01.2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan</b>	%	<b>95</b>	<b>12.644.019.983</b>	<b>96</b>	<b>13.096.158.545</b>	<b>97</b>	<b>13.875.249.592</b>	<b>97</b>	<b>61.183.560.553</b>	
			7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	dok	14	<b>184.662.000</b>	14	<b>202.128.199</b>	14	<b>217.341.068</b>	14	<b>896.371.267</b>	
			7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	47.517.800	4	52.269.580	4	57.496.538	4	230.006.918	
			7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	84.217.700	1	91.639.469	1	95.803.415	1	384.307.584	
			7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	Dokumen	1	8.855.000	1	9.740.500	1	10.714.550	1	43.920.050	

				Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.776.200	1	5.253.820	1	5.779.252	1	26.171.272	#####
			7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	5.046.800	2	5.551.480	2	6.106.628	2	28.462.908	
			7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	23.578.500	4	25.936.350	4	28.529.985	4	115.329.835	

			7.01.01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	10.670.000	1	11.737.000	1	12.910.700	1	68.172.700	
			7.01.01.2. 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan</b>	%	100	<b>10.176.033.753</b>	100	<b>10.399.939.691</b>	100	<b>10.924.891.975</b>	100	<b>50.701.287.973</b>	
			7.01.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	10.081.391.953	12	10.300.833.711	12	10.815.875.397	24	50.239.228.615	#####
			7.01.01.2. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	4.400.000	2	4.840.000	2	5.324.000	4	23.444.000	
			7.01.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	2	90.241.800	2	94.265.980	2	103.692.578	4	438.615.358	#####

					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
			7.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Kecamatan</b>	dok	2	59.077.000	2	64.984.700	2	68.000.000	2	307.153.700	#####
			7.01.01.2.03.06	Penata Usahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	59.077.000	2	64.984.700	2	68.000.000	2	307.153.700	#####
			7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kehadiran pegawai Kecamatan</b>	%	100	29.675.800	100	32.643.380	100	35.907.718	0	147.708.898	#####
			7.01.01.2.05.02	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	70	-	70	-	80	-	0	-	-
			7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	70	-	80	-	0	-	-
			7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	12	-	12	-	0	-	-



			7.01.01.2. 05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	70	-	80	-	0	-	-
			7 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang				-		-		-	-
			7.01.01.2. 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	45	29.675.800	45	32.643.380	45	35.907.718	0	147.708.89 8	#####
			7.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>bln</b>	12	<b>229.325.730</b>	12	<b>246.692.306</b>	12	<b>271.361.53 6</b>	24	<b>1.210.822. 450</b>	#####
			7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2.151.235	12	2.366.358	12	2.602.994	24	11.031.877	
			7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	12	26.269.872	12	28.896.859	12	31.786.545	24	136.235.19 5	

					Perlengkapan Kantor yang Disediakan										
			7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	3.377.981	5	3.715.779	5	4.087.357	24	11.181.118	4087356
			7.01.01.2. 06.0	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	56.317.800	12	61.949.580	12	68.144.538	24	301.609.918	
			7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	7.690.892	12	8.459.981	12	9.305.979	24	45.872.523	
			7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	-	12	-	12	-	24	8.300.000	
			7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	16.500.000	10	18.150.000	10	19.965.000	24	89.615.000	
			7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	111.319.950	12	116.885.948	12	128.574.542	24	588.116.440	

			7.01.01.2. 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5.698.000	1	6.267.800	1	6.894.580	24	18.860.380	
			7.01.01.2. 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	11	<b>463.485.140</b>	45	<b>504.833.653</b>	23	<b>555.317.018</b>	12	<b>2.062.961.611</b>	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	-	3	-	3	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		-		-		-		-	
			7.01.01.2. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	-	35	-	12	-	0	-	
			7.01.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	182.617.760	4	195.879.535	4	215.467.489	7	803.626.384	

			7 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		180.617.760		198.679.536	1	218.547.49 0		597.844.78 6	
			7.01.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	-	1	-	3	236.710.00 0	
			7.01.01.2. 07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	100.249.620	2	110.274.582	2	121.302.04 0	2	424.780.44 2	
			7.01.01.2. 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	12	<b>1.228.242.9 70</b>	12	<b>1.344.067.2 67</b>	12	<b>1.478.473. 994</b>	24	<b>4.572.217. 631</b>	
			7.01.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500	5.500.000	700	6.050.000	800	6.655.000	500	26.205.000	
			7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	67.210.000	12	73.931.000	12	81.324.100	24	334.665.10 0	

			7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.155.532.970	12	1.264.086.267	12	1.390.494.894	24	4.211.347.531	
			7.01.01.2. 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	27	<b>273.517.590</b>	40	<b>300.869.349</b>	45	<b>323.956.284</b>	57	<b>1.285.037.023</b>	
			7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	41.384.750	10	45.523.225	10	50.075.548	17	212.228.523	
			7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	125.894.840	6	138.484.324	6	152.332.756	13	601.520.720	
			7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12.650.000	12	13.915.000	12	15.306.500	24	71.911.500	

			7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	93.588.000	2	102.946.800	2	106.241.480	3	399.376.280	
			7.01.01.2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN WALANTAKA</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	%	67	<b>77.082.138</b>	70	<b>84.790.352</b>	75	<b>93.269.387</b>	<b>90</b>	<b>612.875.523</b>	
			7.01.01.2. 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	dok	1	<b>10.296.000</b>	1	<b>11.325.600</b>	1	<b>12.458.160</b>	0	<b>67.299.760</b>	
			7.01.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Laporan	1	10.296.000	1	11.325.600	1	12.458.160	0	67.299.760	#####

					Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			7.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	%	12	21.221.100	12	23.343.210	12	25.677.531	24	110.551.87 2	
			7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ba ngunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.094.891	12	1.204.380	12	1.324.818	24	4.210.888	
			7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.544.200	12	3.898.620	12	4.288.482	24	20.119.535	
			7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	560.089	1	616.098	1	677.708	0	1.853.895	
			7.01.01.2. 06.0	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.313.000	12	5.844.300	12	6.428.730	24	26.960.030	

			7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	4.308.920	12	4.739.812	12	5.213.793	24	19.183.524	
			7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6.400.000	12	7.040.000	12	7.744.000	24	38.224.000	
			7.01.01.2. 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	2	-	3	-	3	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas	unit	0	-	0	-	1	-	0	-	



				atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan										
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	1	-	-	-	0	-	
			7.01.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	-	2	-	2	-	0	-	
			7.01.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	-	1	-	0	-	
			7.01.01.2. 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	12	<b>37.854.038</b>	12	<b>41.639.442</b>	12	<b>45.803.386</b>	24	<b>314.601.78 1</b>	
			7.01.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300	3.850.000	350	4.235.000	400	4.658.500	212	20.263.500	

			7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	34.004.038	12	37.404.442	12	41.144.886	24	174.338.281	
			7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	120.000.000	
			7.01.01.2. 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	8	<b>7.711.000</b>	40	<b>8.482.100</b>	45	<b>9.330.310</b>	8	<b>43.993.310</b>	
			7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	4.037.000	2	4.440.700	3	4.884.770	4	20.712.370	
			7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	0	-	1	-	1	-	0	-	

				atau Kendaraan Dinas Operasional	dibayarkan Pajak dan Perizinannya										
			7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	3.674.000	5	4.041.400	5	4.445.540	3	18.240.940	
			7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-	1	-	1	-	1	5.040.000	
			#####	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	%	70	-		-		-		<b>76.428.800</b>	
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Walantaka)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	posko	1	-		-		-		<b>76.428.800</b>	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	jumlah posko yang dibentuk	posko	1	-						68.678.800	

				Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org	45	-						7.750.000	
			#####	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN CIGOONG</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	%	67	<b>78.642.871</b>	70	<b>86.507.158</b>	75	<b>95.157.874</b>	<b>90</b>	<b>624.973.202</b>	
			7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	dok	1	<b>10.208.000</b>	1	<b>11.228.800</b>	1	<b>12.351.680</b>	0	<b>70.168.480</b>	

			7.01.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	10.208.000	1	11.228.800	1	12.351.680	0	70.168.480	#####
			7.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	%	12	<b>21.811.371</b>	12	<b>23.992.508</b>	12	<b>26.391.759</b>	24	<b>111.182.13 7</b>	
			7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBa ngunan Kantor yangDisediakan	Paket	12	1.099.931	12	1.209.924	12	1.330.916	24	4.675.771	
			7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.411.100	12	3.752.210	12	4.127.431	24	19.520.741	

			7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	567.050	1	623.755	1	686.131	0	1.876.936	
			7.01.01.2. 06.0	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.126.000	12	5.638.600	12	6.202.460	24	26.171.060	
			7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	5.207.290	12	5.728.019	12	6.300.821	24	20.723.630	
			7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6.400.000	12	7.040.000	12	7.744.000	24	38.214.000	

			7.01.01.2. 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	2	-	3	-	3	-	4	-	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	1	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	1	-	-	-	0	-	
			7.01.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	-	2	-	2	-	0	-	
			7.01.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	-	1	-	1	-	0	-	

					Lainnya yang Disediakan										
			7.01.01.2. 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	12	<b>35.161.500</b>	12	<b>38.677.650</b>	12	<b>42.545.415</b>	24	<b>299.404.565</b>	
			7.01.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300	4.422.000	350	4.864.200	400	5.350.620	212	22.676.820	
			7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	30.739.500	12	33.813.450	12	37.194.795	24	156.727.745	
			7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	120.000.000	
			7.01.01.2. 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	7	<b>11.462.000</b>	40	<b>12.608.200</b>	45	<b>13.869.020</b>	8	<b>63.299.220</b>	



			7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	7.788.000	2	8.566.800	3	9.423.480	4	40.018.280	
			7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	1	-	1	-	0	-	
			7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	3.674.000	5	4.041.400	5	4.445.540	3	18.240.940	
			7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	-	1	-	1	5.040.000	
			#####	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	%	70	-		-		-		<b>80.918.800</b>	

				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Cigoong)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	posko	1	-		-		-		<b>80.918.800</b>	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	posko	1							66.668.800	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org	45							14.250.000	
			7.01.01.2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN NYAPAH</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	%	67	<b>76.530.865</b>	70	<b>84.183.952</b>	75	<b>92.602.347</b>	90	<b>640.034.164</b>	
			7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan</b>	dok	1	<b>10.296.000</b>	1	<b>11.325.600</b>	1	<b>12.458.160</b>	0	<b>70.539.760</b>	

					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										
			7.01.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	10.296.000	1	11.325.600	1	12.458.160	0	70.539.760	#####
			7.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	%	12	<b>21.149.165</b>	12	<b>23.264.082</b>	12	<b>25.590.490</b>	24	<b>110.636.73 7</b>	
			7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.072.500	12	1.179.750	12	1.297.725	24	4.549.975	

			7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.490.300	12	3.839.330	12	4.223.263	24	19.885.893	
			7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	558.441	1	614.286	1	675.714	0	1.848.441	
			7.01.01.2. 06.0	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.313.000	12	5.844.300	12	6.428.730	24	26.956.030	
			7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	4.314.924	12	4.746.416	12	5.221.058	24	19.182.398	
			7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	12	6.400.000	12	7.040.000	12	7.744.000	24	38.214.000	

					Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	2	-	3	-	3	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	1	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	1	-	-	-	0	-	
			7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	-	2	-	2	-	0	-	

			7.01.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	-	1	-	0	-	
			7.01.01.2. 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>36.344.000</b>	12	<b>39.978.400</b>	12	<b>43.976.240</b>	24	<b>308.378.640</b>	
			7.01.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300	4.422.000	350	4.864.200	400	5.350.620	212	22.676.820	
			7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	31.922.000	12	35.114.200	12	38.625.620	24	165.701.820	
			7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	120.000.000	
			7.01.01.2. 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan</b>	%	<b>7</b>	<b>8.741.700</b>	40	<b>9.615.870</b>	45	<b>10.577.457</b>	<b>200</b>	<b>55.579.027</b>	

				<b>Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemerintahan Daerah</b>										
			7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	7.223.700	2	7.946.070	3	8.740.677	4	39.434.447	
			7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	1	-	1	-	0	-	
			7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	1.518.000		1.669.800	5	1.836.780	3	11.104.580	
			7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	-	1	-	1	5.040.000	
			#####	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	%	70			-		-		<b>94.900.000</b>	

				<b>DAN KETERTIBAN UMUM</b>										
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Nyapah)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	posko	1			-		-		<b>94.900.000</b>
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	posko	1							78.400.000
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org	45							16.500.000
			7.01.01.2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN PANGAMPELAN</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	%	67	<b>79.065.748</b>	70	<b>86.972.323</b>	75	<b>95.669.555</b>	<b>90</b>	<b>632.532.691</b>



			7.01.01.2. 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	dok	1	10.208.000	1	11.228.800	1	12.351.680	0	70.168.480	
			7.01.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	10.208.000	1	11.228.800	1	12.351.680	0	70.168.480	#####
			7.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	%	12	19.531.548	12	21.484.703	12	23.633.173	24	98.894.189	
			7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12	1.076.024	12	1.183.627	12	1.301.990	24	4.601.281	

					yang Disediakan										
			7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.555.776	12	3.911.354	12	4.302.489	24	20.175.665	
			7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	700.197	1	770.217	1	847.239	0	2.317.653	
			7.01.01.2. 06.0	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.520.000	12	3.872.000	12	4.259.200	24	19.395.200	
			7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	4.279.550	12	4.707.505	12	5.178.256	24	17.190.391	
			7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	-	

			7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6.400.000	12	7.040.000	12	7.744.000	24	35.214.000	
			7.01.01.2. 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	2	-	3	-	3	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	1	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	1	-	-	-	0	-	
			7.01.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	-	2	-	2	-	0	-	

			7.01.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	-	1	-	0	-	
			7.01.01.2. 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	12	<b>38.434.000</b>	12	<b>42.277.400</b>	12	<b>46.505.140</b>	<b>24</b>	<b>307.796.540</b>	
			7.01.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300	3.872.000	350	4.259.200	400	4.685.120	212	20.356.320	
			7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	34.562.000	12	38.018.200	12	41.820.020	24	167.440.220	
			7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	120.000.000	

			7.01.01.2. 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	8	10.892.200	40	11.981.420	45	13.179.562	8	60.854.682	
			7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	8.514.000	2	9.365.400	3	10.301.940	4	43.892.840	
			7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	1	-	1	-	0	-	
			7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	2.378.200	5	2.616.020	5	2.877.622	3	11.921.842	
			7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	Unit	1		1	-	1	-	1	5.040.000	

			#####	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	<b>%</b>								<b>94.818.800</b>	
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Pengampelan)</b>	Jumlah Posko yang terfasilitasi	posko								<b>94.818.800</b>	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	posko								78.318.800	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org								16.500.000	
			#####	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Keseekretarian Kelurahan</b>	<b>%</b>	67	<b>80.481.359</b>	70	<b>88.529.495</b>	75	<b>97.382.444</b>	<b>90</b>	<b>632.763.25 9</b>	

				<b>DAERAH KELURAHAN KIARA</b>											
			7.01.01.2. 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	dok	1	10.296.000	1	11.325.600	1	12.458.160	0	70.539.760	
			7.01.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	10.296.000	1	11.325.600	1	12.458.160	0	70.539.760	#####
			7.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	%	12	20.494.285	12	22.543.713	12	24.798.084	24	104.689.85 5	

			7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.136.300	12	1.249.930	12	1.374.923	24	4.777.144	
			7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.342.900	12	3.677.190	12	4.044.909	24	19.248.021	
			7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	889.178	1	978.096	1	1.075.906	0	2.943.181	
			7.01.01.2. 06.0	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.620.000	12	5.082.000	12	5.590.200	24	24.036.200	
			7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	4.105.906	12	4.516.497	12	4.968.147	24	18.511.310	
			7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	12	-	12	-	12	-	24	-	



					Undangan yang Disediakan										
			7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6.400.000	12	7.040.000	12	7.744.000	24	35.174.000	
			7.01.01.2. 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	2	-	3	-	3	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	1	-	0	-	

				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	1	-	-	-	0	-	
			7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	-	2	-	2	-	0	-	
			7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	-	1	-	0	-	
			7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	12	<b>37.069.674</b>	12	<b>40.776.642</b>	12	<b>44.854.306</b>	<b>b</b>	<b>309.453.010</b>	
			7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300	4.422.000	350	4.864.200	400	5.350.620	212	22.676.820	
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	32.647.674	12	35.912.442	12	39.503.686	24	166.776.190	

			7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	120.000.000	
			7.01.01.2. 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	8	<b>12.621.400</b>	40	<b>13.883.540</b>	45	<b>15.271.894</b>	200	<b>66.496.834</b>	
			7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	9.438.000	2	10.381.800	3	11.419.980	4	47.879.780	
			7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	1	-	1	-	0	-	
			7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	3.183.400	5	3.501.740	5	3.851.914	3	13.577.054	

			7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1	-	1	-	1	5.040.000	
			#####	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	%	70							<b>81.583.800</b>	
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Kiara)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	posko	1							<b>81.583.800</b>	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	posko	1							67.333.800	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org	35]							14.250.000	

			#####	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN PAGER AGUNG</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Keseekretariatan Kelurahan</b>	%	67	75.148.945	70	82.663.840	75	90.930.224	90	645.417.10 0	
			7.01.01.2. 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	dok	1	10.296.000	1	11.325.600	1	12.458.160	0	70.539.760	
			7.01.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	10.296.000	1	11.325.600	1	12.458.160	0	70.539.760	#####
			7.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan</b>	%	12	21.264.607	12	23.391.068	12	25.730.174	24	110.913.66 5	

					<b>administrasi umum Perangkat Daerah</b>										
			7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ba ngunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.111.391	12	1.222.530	12	1.344.783	24	4.718.303	
			7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.530.633	12	3.883.696	12	4.272.065	24	20.069.560	
			7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	751.584	1	826.742	1	909.416	0	2.487.742	
			7.01.01.2. 06.0	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.071.000	12	5.578.100	12	6.135.910	24	25.939.010	
			7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	4.400.000	12	4.840.000	12	5.324.000	24	19.485.050	

			7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6.400.000	12	7.040.000	12	7.744.000	24	38.214.000	
			7.01.01.2. 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	2	-	3	-	3	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	1	-	0	-	

				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	1	-	-	-	0	-	
			7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	-	2	-	2	-	34	-	
			7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	-	1	-	1	-	
			7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	12	<b>34.972.588</b>	12	<b>38.469.847</b>	12	<b>42.316.832</b>	24	<b>323.448.543</b>	
			7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300	4.422.000	350	4.864.200	400	5.350.620	212	22.676.820	



			7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	30.550.588	12	33.605.647	12	36.966.212	24	156.771.723	
			7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	144.000.000	
			7.01.01.2. 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	8	<b>8.615.750</b>	40	<b>9.477.325</b>	45	<b>10.425.058</b>	200	<b>49.515.133</b>	
			7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	5.432.350	2	5.975.585	3	6.573.144	4	27.858.079	
			7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	0	0	1	-	1	-	0	-	

				atau Kendaraan Dinas Operasional	dibayarkan Pajak dan Perizinannya										
			7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	3.183.400	5	3.501.740	5	3.851.914	3	16.617.054	
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1	-	1	-	1	5.040.000	
			#####	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	%	70							<b>91.000.000</b>	
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Pager Agung)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	posko	1							<b>91.000.000</b>	

				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	posko	1							85.750.000	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org	35							5.250.000	
			#####	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN KALODRAN</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	%	<b>67</b>	<b>77.846.380</b>	70	<b>85.631.018</b>	75	<b>94.194.119</b>	90	<b>610.065.596</b>	
			7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	dok	1	<b>10.208.000</b>	1	<b>11.228.800</b>	1	<b>12.351.680</b>	0	<b>70.168.480</b>	

			7.01.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	10.208.000	1	11.228.800	1	12.351.680	0	70.168.480	#####
			7.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	%	12	<b>26.123.456</b>	12	<b>28.735.801</b>	12	<b>31.609.381</b>	24	<b>134.022.07 8</b>	
			7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.120.427	12	1.232.470	12	1.355.717	24	4.743.613	
			7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2.642.134	12	2.906.347	12	3.196.982	24	16.259.904	

			7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	657.895	1	723.684	1	796.052	0	2.177.631	
			7.01.01.2. 06.0	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.335.000	12	5.868.500	12	6.455.350	24	27.052.850	
			7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	4.246.000	12	4.670.600	12	5.137.660	24	21.624.260	
			7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12.122.000	12	13.334.200	12	14.667.620	24	62.163.820	

			7.01.01.2. 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	2	-	3	-	3	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	1	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	1	-	-	-	0	-	
			7.01.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	-	2	-	2	-	0	-	
			7.01.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	-	1	-	1	-	0	-	

					Lainnya yang Disediakan											
			7.01.01.2. 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	12		12	<b>33.022.000</b>		<b>36.324.200</b>		<b>39.956.620</b>	24	<b>294.362.820</b>
			7.01.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300		350	2.200.000		2.420.000		2.662.000	212	13.302.000
			7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		12	30.822.000		33.904.200		37.294.620	24	161.060.820
			7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		12	-		-		-	24	120.000.000
			7.01.01.2. 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	8		40	<b>8.492.924</b>		<b>9.342.216</b>		<b>10.276.438</b>	200	<b>51.513.418</b>

			7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	5.309.524	2	5.840.476	3	6.424.524	4	29.856.364	
			7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	1	-	1	-	0	-	
			7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	3.183.400	5	3.501.740	5	3.851.914	3	16.617.054	
			7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1	-	1	-	1	5.040.000	



			#####	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	%										<b>59.998.800</b>	
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Kalodran)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	posko										59.998.800	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	posko										55.248.800	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org										4.750.000	
			#####	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	%	<b>67</b>	<b>90.165.307</b>	<b>70</b>	<b>99.181.838</b>	<b>75</b>	<b>109.100.02 1</b>	<b>90</b>	<b>695.091.72 8</b>			

				<b>KELURAHAN KEPUREN</b>											
			7.01.01.2. 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	dok	1	10.296.000	1	11.325.600	1	12.458.160	0	70.539.760	
			7.01.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	10.296.000	1	11.325.600	1	12.458.160	0	70.539.760	#####
			7.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	%	12	21.847.607	12	24.032.368	12	26.435.604	24	112.228.14 1	

			7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	902.391	12	992.630	12	1.091.893	24	4.026.557	
			7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.695.633	12	4.065.196	12	4.471.715	24	20.765.710	
			7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1.378.584	1	1.516.442	1	1.668.086	0	4.563.112	
			7.01.01.2. 06.0	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.071.000	12	5.578.100	12	6.135.910	24	25.923.010	
			7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	4.400.000	12	4.840.000	12	5.324.000	24	19.485.752	
			7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	12	-	12	-	12	-	24	-	

					Undangan yang Disediakan										
			7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6.400.000	12	7.040.000	12	7.744.000	24	37.464.000	
			7.01.01.2. 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	2	-	3	-	3	-	34	-	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	1	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	unit	0	-	1	-	-	-	0	-	

				Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Disediakan										
			7.01.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	-	2	-	2	-	4	-	
			7.01.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	-	1	-	0	-	
			7.01.01.2. 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	12	<b>38.544.000</b>	12	<b>42.398.400</b>	12	<b>46.638.240</b>	24	<b>316.740.640</b>	
			7.01.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300	4.422.000	350	4.864.200	400	5.350.620	212	22.176.820	
			7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	34.122.000	12	37.534.200	12	41.287.620	24	174.563.820	

			7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	120.000.000	
			7.01.01.2. 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	8	<b>19.477.700</b>	40	<b>21.425.470</b>	45	<b>23.568.017</b>	200	<b>100.583.187</b>	
			7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	9.313.700	2	10.245.070	3	11.269.577	4	47.365.347	
			7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	1	-	1	-	0	-	
			7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	4.778.400	5	5.256.240	5	5.781.864	8	25.455.504	

			7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.385.600	1	5.924.160	1	6.516.576	2	27.762.336	
			#####	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	%								<b>95.000.000</b>	
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Kepuren)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	posko								<b>95.000.000</b>	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	posko								78.500.000	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org								16.500.000	

			#####	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN TERITIH</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Keseekretariatan Kelurahan</b>	%	67	84.469.409	70	92.916.350	75	102.207.98 5	90	557.467.91 7	
			7.01.01.2. 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	dok	1	10.208.000	1	11.228.800	1	12.351.680	0	70.168.480	
			7.01.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	10.208.000	1	11.228.800	1	12.351.680	0	70.168.480	#####
			7.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan</b>	%	12	20.428.300	12	22.471.130	12	24.718.243	24	105.192.81 6	



					<b>administrasi umum Perangkat Daerah</b>										
			7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	694.100	12	763.510	12	839.861	24	3.064.571	
			7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.995.200	12	4.394.720	12	4.834.192	24	21.973.107	
			7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1.100.000	1	1.210.000	1	1.331.000	0	3.641.000	
			7.01.01.2. 06.0	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.620.000	12	5.082.000	12	5.590.200	24	24.036.200	
			7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3.619.000	12	3.980.900	12	4.378.990	24	14.313.938	

			7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6.400.000	12	7.040.000	12	7.744.000	24	38.164.000	
			7.01.01.2. 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	2	-	3	-	3	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	1	-	0	-	

				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	1	-	-	-	0	-	
			7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	-	2	-	2	-	0	-	
			7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	-	1	-	1	-	
			7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	12	<b>36.937.109</b>	12	<b>40.630.820</b>	12	<b>44.693.902</b>	24	<b>307.230.861</b>	
			7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300	4.422.000	350	4.864.200	400	5.350.620	212	22.676.820	
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	12	32.515.109	12	35.766.620	12	39.343.282	24	164.554.041	

					Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
			7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	120.000.000	
			7.01.01.2. 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	8	<b>16.896.000</b>	40	<b>18.585.600</b>	45	<b>20.444.160</b>	200	<b>74.875.760</b>	
			7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	4.928.000	2	5.420.800	3	5.962.880	4	24.141.680	
			7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	3.960.000	1	4.356.000	1	4.791.600	0	13.107.600	

			7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	8.008.000	5	8.808.800	5	9.689.680	3	32.586.480	
			7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1	-	1	-	1	5.040.000	
			#####	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	%									
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Teritih)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	posko									
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	posko									

				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org									
			#####	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN PABUARAN</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	%	67	89.425.552	70	98.368.108	75	108.204.918	90	688.484.637	
			7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	dok	1	10.208.000	1	11.228.800	1	12.351.680	0	70.168.480	
			7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Laporan	1	10.208.000	1	11.228.800	1	12.351.680	0	70.168.480	#####

					Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			7.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	%	12	<b>26.461.552</b>	12	<b>29.107.708</b>	12	<b>32.018.478</b>	24	<b>134.155.79 7</b>	
			7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBa ngunan Kantor yangDisediakan	Paket	12	973.891	12	1.071.280	12	1.178.408	24	4.263.222	
			7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.514.667	12	4.966.134	12	5.462.747	24	24.222.210	
			7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	907.595	1	998.354	1	1.098.189	0	3.004.138	

			7.01.01.2. 06.0	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.518.400	12	9.370.240	12	10.307.264	24	40.483.904	
			7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3.025.000	12	3.327.500	12	3.660.250	24	14.934.504	
			7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	8.522.000	12	9.374.200	12	10.311.620	24	47.247.820	
			7.01.01.2. 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	2	-	3	-	3	-	4	-	



				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	1	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	1	-	-	-	0	-	
			7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	-	2	-	2	-	0	-	
			7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	-	1	-	0	-	
			7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	12	<b>37.994.000</b>	12	<b>41.793.400</b>	12	<b>45.972.740</b>	24	<b>315.340.140</b>	

			7.01.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300	4.422.000	350	4.864.200	400	5.350.620	212	22.676.820	
			7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	33.572.000	12	36.929.200	12	40.622.120	24	172.663.320	
			7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	120.000.000	
			7.01.01.2. 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	8	<b>14.762.000</b>	40	<b>16.238.200</b>	45	<b>17.862.020</b>	200	<b>74.830.220</b>	
			7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	7.965.100	2	8.761.610	3	9.637.771	4	41.212.481	

			7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	4.418.700	1	4.860.570	1	5.346.627	0	14.625.897	
			7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	2.378.200	5	2.616.020	5	2.877.622	3	13.951.842	
			7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1	-	1	-	1	5.040.000	
			#####	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	%								<b>93.990.000</b>	
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	posko								<b>93.990.000</b>	

				(Kelurahan Pabuaran)											
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	posko								77.490.000	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org								16.500.000	
			#####	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN PASULUHAN</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	%	<b>67</b>	<b>86.999.543</b>	<b>70</b>	<b>95.699.498</b>	<b>75</b>	<b>105.269.447</b>	<b>90</b>	<b>590.962.512</b>	
			7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi</b>	dok	1	<b>10.516.000</b>	1	<b>11.567.600</b>	1	<b>12.724.360</b>	0	<b>71.187.960</b>	

					<b>Keuangan Perangkat Daerah</b>										
			7.01.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	10.516.000	1	11.567.600	1	12.724.360	0	71.187.960	#####
			7.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	%	12	<b>20.826.843</b>	12	<b>22.909.528</b>	12	<b>25.200.480</b>	24	<b>39.948.375</b>	
			7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	973.891	12	1.071.280	12	1.178.408	24	1.039.644	

			7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.244.953	12	3.569.448	12	3.926.393	24	8.122.977	
			7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.280.000	1	5.808.000	1	6.388.800	0	-	
			7.01.01.2. 06.0	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.928.000	12	5.420.800	12	5.962.880	24	8.824.000	
			7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12		12	-	12	-	24	4.921.754	
			7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	12	6.400.000	12	7.040.000	12	7.744.000	24	17.040.000	

					Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	2	-	3	-	3	-	4	-	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	1	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	1	-	-	-	0	-	
			7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	-	2	-	2	-	0	-	
			7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	1	-	1	-	1	-	0	-	

				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan										
			7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	12	<b>33.473.000</b>	12	<b>36.820.300</b>	12	<b>40.502.330</b>	24	<b>290.965.630</b>	
			7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300	4.422.000	350	4.864.200	400	5.350.620	212	22.676.820	
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	29.051.000	12	31.956.100	12	35.151.710	24	148.288.810	
			7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	120.000.000	
			7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	6	<b>22.183.700</b>	40	<b>24.402.070</b>	45	<b>26.842.277</b>	200	<b>101.085.547</b>	



			7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		9.281.250	2	10.209.375	3	11.230.313	4	47.318.438	
			7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	8.049.250	1	8.854.175	1	9.739.593	0	26.643.018	
			7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	4.853.200	5	5.338.520	5	5.872.372	3	22.084.092	
			7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1	-	1	-	1	5.040.000	
			#####	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	%								<b>87.775.000</b>	

				<b>DAN KETERTIBAN UMUM</b>											
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Pasuluhan)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	posko									<b>87.775.000</b>
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	posko									71.295.000
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org									16.480.000
			#####	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	%	<b>67</b>	<b>87.444.339</b>	<b>70</b>	<b>96.188.773</b>	<b>75</b>	<b>105.807.650</b>	<b>90</b>	<b>583.328.297</b>	

				<b>KELURAHAN TEGALSARI</b>											
			7.01.01.2. 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	dok	1	10.208.000	1	11.228.800	1	12.351.680	0	70.168.480	
			7.01.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	10.208.000	1	11.228.800	1	12.351.680	0	70.168.480	#####
			7.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	%	12	19.670.039	12	21.637.043	12	23.800.747	24	105.401.36 4	

			7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.085.055	12	1.193.561	12	1.312.917	24	4.626.533	
			7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.788.400	12	4.167.240	12	4.583.964	24	21.124.138	
			7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	751.584	1	826.742	1	909.416	0	2.487.742	
			7.01.01.2. 06.0	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.620.000	12	5.082.000	12	5.590.200	24	24.036.200	
			7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3.025.000	12	3.327.500	12	3.660.250	24	14.927.750	

			7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6.400.000	12	7.040.000	12	7.744.000	24	38.199.000	
			7.01.01.2. 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	2	-	3	-	3	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	1	-	0	-	

				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	1	-	-	-	0	-	
			7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	-	2	-	2	-	0	-	
			7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	-	1	-	0	-	
			7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	12	<b>38.544.000</b>	12	<b>42.398.400</b>	12	<b>46.638.240</b>	24	<b>316.660.640</b>	
			7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300	4.422.000	350	4.864.200	400	5.350.620	212	22.676.820	
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	12	34.122.000	12	37.534.200	12	41.287.620	24	173.983.820	

					Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
			7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	120.000.000	
			7.01.01.2. 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	8	<b>19.022.300</b>	40	<b>20.924.530</b>	45	<b>23.016.983</b>	200	<b>91.097.813</b>	
			7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	9.313.700	2	10.245.070	3	11.269.577	4	47.842.347	
			7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	4.149.200	1	4.564.120	1	5.020.532	0	13.733.852	

			7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	3.183.400	5	3.501.740	5	3.851.914	3	16.617.054	
			7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.376.000	1	2.613.600	1	2.874.960	1	12.904.560	
			#####	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	%									
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Tegalsari)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	posko									
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	posko									



				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org									
			#####	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN PIPITAN</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	%	\	90.288.136	70	99.316.950	75	109.248.645	90	683.563.928	
			7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	dok	1	10.208.000	1	11.228.800	1	12.351.680	0	70.168.480	
			7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Laporan	1	10.208.000	1	11.228.800	1	12.351.680	0	70.168.480	#####

					Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			7.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	%	12	<b>19.883.736</b>	12	<b>21.872.110</b>	12	<b>24.059.321</b>	24	<b>105.880.47 5</b>	
			7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.149.097	12	1.264.007	12	1.390.408	24	4.843.156	
			7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.921.744	12	4.313.919	12	4.745.310	24	21.704.149	
			7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	767.895	1	844.684	1	929.152	0	2.541.731	

			7.01.01.2. 06.0	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.620.000	12	5.082.000	12	5.590.200	24	24.036.200	
			7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3.025.000	12	3.327.500	12	3.660.250	24	14.531.238	
			7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6.400.000	12	7.040.000	12	7.744.000	24	38.224.000	
			7.01.01.2. 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	2	-	3	-	3	-	4	-	

				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	1	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	1	-	-	-	0	-	
			7.01.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	-	2	-	2	-	4	-	
			7.01.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	-	1	-	0	-	
			7.01.01.2. 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	12	<b>38.544.000</b>	12	<b>42.398.400</b>	12	<b>46.638.240</b>	24	<b>319.122.529</b>	

			7.01.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300	4.422.000	350	4.864.200	400	5.350.620	212	22.676.820	
			7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	34.122.000	12	37.534.200	12	41.287.620	24	176.445.709	
			7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	120.000.000	
			7.01.01.2. 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	8	<b>21.652.400</b>	40	<b>23.817.640</b>	45	<b>26.199.404</b>	200	<b>93.112.444</b>	
			7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	7.788.000	2	8.566.800	3	9.423.480	4	36.438.280	

			7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	7.194.000	1	7.913.400	1	8.704.740	0	23.812.140	
			7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	3.183.400	5	3.501.740	5	3.851.914	3	16.520.054	
			7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.487.000	1	3.835.700	1	4.219.270	1	16.341.970	
			#####	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	%								<b>95.280.000</b>	
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Pipitan)</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	<b>posko</b>								<b>95.280.000</b>	

				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	posko								85.530.000	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org								9.750.000	
			#####	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KELURAHAN LEBAKWANGI</b>	<b>Persentase Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan</b>	%	<b>67</b>	<b>81.031.655</b>	<b>70</b>	<b>89.134.820</b>	<b>75</b>	<b>98.048.302</b>	<b>90</b>	<b>669.282.391</b>	
			7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dok</b>	<b>1</b>	<b>10.208.000</b>	<b>1</b>	<b>11.228.800</b>	<b>1</b>	<b>12.351.680</b>	<b>0</b>	<b>69.738.480</b>	

			7.01.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	10.208.000	1	11.228.800	1	12.351.680	0	69.738.480	#####
			7.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	%	12	<b>17.035.305</b>	12	<b>18.738.835</b>	12	<b>20.612.719</b>	24	<b>97.034.472</b>	
			7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12		12	-	12	-	24	946.933	
			7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12		12	-	12	-	24	8.715.168	



			7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.057.305	1	4.463.035	1	4.909.339	0	13.429.679	
			7.01.01.2. 06.0	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.928.000	12	5.420.800	12	5.962.880	24	25.335.680	
			7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	1.650.000	12	1.815.000	12	1.996.500	24	10.383.012	
			7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	-	
			7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6.400.000	12	7.040.000	12	7.744.000	24	38.224.000	

			7.01.01.2. 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	2	-	3	-	3	-	4	-	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	1	-	0	-	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	1	-	-	-	0	-	
			7.01.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	-	2	-	2	-	4	-	
			7.01.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	-	1	-	1	-	0	-	

					Lainnya yang Disediakan										
			7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	12	<b>38.544.000</b>	12	<b>42.398.400</b>	12	<b>46.638.240</b>	24	<b>329.660.640</b>	
			7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300	4.422.000	350	4.864.200	400	5.350.620	212	22.676.820	
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	34.122.000	12	37.534.200	12	41.287.620	24	174.983.820	
			7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	12	-	12	-	24	132.000.000	
			7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	8	<b>15.244.350</b>	40	<b>16.768.785</b>	45	<b>18.445.664</b>	200	<b>77.848.799</b>	

			7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	8.910.000	2	9.801.000	3	10.781.100	4	45.762.100	
			7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	4.101.350	1	4.511.485	1	4.962.634	0	13.575.469	
			7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	2.233.000	5	2.456.300	5	2.701.930	3	13.471.230	
			7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1	-	1	-	1	5.040.000	

			#####	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian penanganan k3</b>	<b>%</b>										<b>95.000.000</b>	
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kelurahan Lebakwangi</b>	<b>Jumlah Posko yang terfasilitasi</b>	<b>posko</b>										<b>95.000.000</b>	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko yang dibentuk	posko										78.500.000	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	org										16.500.000	

Tabel 6.2

## Rumusan dan Definisi Operasional Indikator Renstra PD

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
	Indikator	Satuan	Penjelasan/Keterangan	Rumus/Formula
1	2	3	5	4
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Walantaka</b>	<b>Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Walantaka</b>	<b>point</b>	<i>diselenggarakan oleh Inspektorat</i>	<i>Hasil Evaluasi SAKIP</i>
Meningkatnya capaian kinerja utama Kecamatan Walantaka	<i>Rata-rata Tingkat Capaian IKU Kecamatan Walantaka</i>	%	<i>SK IKU</i>	<i>IKU Kecamatan Walantaka</i>
<b>Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan</b>	<b>Point</b>	<i>diselenggarakan oleh BAPPEDA</i>	<i>Di Ukur Oleh Bappeda (mengukur semua asepek penyelenggaraan pemerintahandi Kecamatan)</i>
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik tingkat Kecamatan	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan</i>	point	<i>diselenggarakan oleh BAPPEDA</i>	<i>Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>
Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan pada Kecamatan	<i>Presentase Kelurahan Kategori Cepat berkembang</i>	%	<i>Prodeskel/Evdeskel</i>	<i>Jumlah Kelurahan Kategoricepat berkembang ----- x100% Jumlah Kelurahan</i>

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
1		Indikator	Satuan	Penjelasan/Keterangan	Rumus/Formulasi
1		2	3	5	4
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai SOP/SP/Ketentuan</b>	<b>%</b>		$\frac{\text{Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan kecamatan sesuai SOP/peraturan}}{\text{Jumlah pelayanan Publik yang dilimpahkan kepada kecamatan}} \times 100\%$
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terfasilitasi	%		$\frac{\text{Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan}} \times 100\%$
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang dilaksanakan}}{\text{Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan}} \times 100\%$

Tujuan/Sasaran/Program/		Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator	Satuan	Penjelasan/Keterangan	Rumus/Formulasi
1		2	3	5	4
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Presentase Sarana dan prasaran pelayanan umumterpelihara	%		$\frac{\text{Jumlah sarpras pelayanan umum yang dipelihara}}{\text{Jumlah sarpras yang ada}} \times 100\%$
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%		$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat}} \times 100\%$
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Indeks Profil Kelurahan</b>	<b>Point</b>	<b>Hasil Perhitungan Prodeskel</b>	<b>Jumlah kelurahan cepat berkembang</b> $\frac{\text{Jumlah Kelurahan Cepat Berkembang}}{\text{Jumlah total kelurahan}} \times 100\%$
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	Presentase pelaksanaan pemberdayaan di kelurahan	%		$\frac{\text{Jumlah Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Pemberdayaan}} \times 100\%$
	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	Presentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	%	Pokmas, Kader, UMKM, Karang Taruna	$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan}}{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan}} \times 100\%$



Tujuan/Sasaran/Program/		Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator	Satuan	Penjelasan/Keterangan	Rumus/Formulasi
1		2	3	5	4
	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	Presentase keluarga Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan	%		$\frac{\text{Jumlah Keluarga terfasilitasi pemberdayaan}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100\%$
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Presentase gangguan TRANTIBUM yang terselesaikan</b>	%		$\frac{\text{Jumlah Gangguan Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Laporan Gangguan}} \times 100\%$
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	%		$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkadayang diterapkan dan di tegakan}}{\text{Jumlah perda dan perkada}} \times 100\%$
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Presentase penyelenggaraan pemerintahan umum dikecamatan</b>	%		$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan dilaksanakan}}{\text{Jumlah Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepala daerah}} \times 100\%$
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Jumlah kegiatan/ event pemerintahan umum yang dilaksanakan kecamatan	Event		Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan</b>	Poin		$\frac{\text{Jumlah responden yang mengisi puas}}{\text{100%Jumlah total responden}} \times 100\%$
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan \& evaluasi kinerja yang disusun}}{\text{---}} \times 100$

Tujuan/Sasaran/Program/		Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator	Satuan	Penjelasan/Keterangan	Rumus/Formulasi
1		2	3	5	4
					Jumlah target dokumen perencanaan & evaluasi kinerja
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%		$\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen administrasi keuangan PD yang disusun}}{\text{Jumlah target dokumen administrasi keuangan PD yang disusun}} \times 100$
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%		$\frac{\text{Jumlah dokumen administrasi BMD yang disusun}}{\text{Jumlah target dokumen administrasi BMD}} \times 100$
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan penunjang administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		$\text{Perorang} = \frac{\text{Jumlah kehadiran ASN}}{\text{Jumlah hari kerja}} \times 100$ $\text{PerOPD} = \text{Nilai Rata-rata dari jumlah perorang}$
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan penunjang administrasi umum perangkat daerah	%		$\frac{\text{Jumlah Bulan pelayanan adm.umum}}{\text{Jumlah target pelayanan adm.umum}} \times 100$
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase ketersediaan hasil pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		$\frac{\text{Jumlah realisasi pengadaan BMD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah target pengadaan BMD tahun berkenaan}} \times 100$

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
1		Indikator	Satuan	Penjelasan/Keterangan	Rumus/Formulasi
1		2	3	5	4
					100 Jumlah target pengadaan BMD tahun berkenaan
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		Jumlah realisasi pelayanan jasa ----- ---- x 100 Jumlah target pelayanan jasa
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%		Jumlah unit BMD yang dipelihara -----x100 Jumlah total unit BMD

Tabel 6.3

Rumusan Rencana Pelaksanaan Proyek Prioritas/Strategis RPD Tahun 2024-2026

No.	Proyek Prioritas / Strategis	Rencana Fokus Pelaksanaan			Sumber Pembiayaan
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		NIHIL			

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur **output atau outcome**, karena indikator kinerja memiliki alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan kata lain fungsi dari indikator kinerja adalah menjelaskan informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas dengan menggunakan ukuran secara kuantitatif yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan suatu organisasi dalam pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat **outcome** dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Secara sederhana Indikator Kinerja akan menjadi tolak ukur evaluasi dan Indikator Kinerja Utaman yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Walantaka bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung tujuan pembangunan daerah tahun 2024-2026. Adapun sasaran yang akan dikerjakan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2024-2026 sebagaimana Indikator Kinerja perangkat daerah tercantum dalam RPD sebagai berikut:

Tabel 7.1

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	STRATEGIS						
1	2	3	5	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} * 100$
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	Point	80	80	100
2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan	Hasil evaluasiLKjIP	%	54	54	100

Tabel 7.2

## Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Menurut

## Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator	Satuan	Kinerja pada awal periode Renstra (2023)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun			Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)
					2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9

Tabel 7.3

## Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah

Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Indikator SPM	Satuan	Kinerja pada awal periode Renstra (2023)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun			Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)
					2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
					NIHIL			

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Walantaka Kota Serang Tahun 2024-2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kecamatan Walantaka berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Walantaka adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah (RPD) Kota Serang Tahun 2024-2026 sebagai acuan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian Pembangunan Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Walantaka Kota Serang Tahun 2024-2026 sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok- pokok program Kecamatan Walantaka sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Walantaka.

Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2024-2026 kemudian dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Kecamatan Walantaka yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari rencana kerja (Renja) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Walantaka

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Walantaka Tahun 2024-2026 diharapkan mampu menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2024-2026 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan

Demikian kami sampaikan semoga dokumen Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kota Serang.

Serang, Maret 2023

CAMAT WALANTAKA



MUSLIM SHOLEH, S.Pd., M.Si  
NIP. 19800410 200801 1 010